

**ANALISIS KERJA SAMA BILATERAL INDONESIA -
TIONGKOK MELALUI LOCAL CURRENCY SETTLEMENT
DITINJAU DARI PERSPEKTIF RATIONAL CHOICE
TAHUN 2018 - 2022
SKRIPSI**



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

Muhammad Aji Syahrindra

18323123

Dibimbing oleh:

Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

Halaman Pengesahan

Analisis Kerja Sama Bilateral Indonesia - Tiongkok Melalui Local Currency Settlement Ditinjau dari Perspektif Rational Choice Tahun 2018-2022

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

23 Januari 2025

Mengesahkan

**Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Ketua Program Studi



Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.

2 Rizki Dian Nursita, S.I.P., M.H.I.

3 Hasbi Aswar, S.I.P., M.A., Ph.D.

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

Masukkan tanggal, 23 Januari 2025



Muhammad Aji Syahrindra

DAFTAR ISI

Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Integritas Akademik	iii
Daftar Tabel	3
Daftar Gambar	4
Abstrak	6
BAB 1 PENDAHULUAN	7
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Cakupan penelitian	11
1.5 Tinjauan Pustaka	12
1.6 Kerangka Pemikiran	14
1.8 Metode Penelitian	17
1.8.1 Jenis Penelitian	17
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	17
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	17
1.8.4 Proses Penelitian	17
1.9 Sistematika Pembahasan	17
BAB 2	19
Proses Diversifikasi Mata Uang Lokal Sebagai Bentuk Stabilitas Ekonomi	19
2.1 Hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok dalam konteks LCS	20
2.2 Transaksi <i>Local Currency Settlement</i> yang Berlaku di Indonesia	23
2.3 Pandangan Pemangku Kebijakan dalam Mendorong Kerja Sama LCS	27
Bab 3	30
Teori <i>Rational Choices</i> dari Graham T. Allison: Kerja Sama LCS Antara Indonesia dan Tiongkok	30
3.1 <i>Goals and Objective: Local Currency Settlement</i> Sebagai Upaya Stabilitas Nilai Rupiah	31
3.1.1 LCS sebagai Strategi Kurangi Eksposur USD dalam Perdagangan	33
3.1.2 Mendorong Diversifikasi Mata Uang Dukung Stabilitas Ekonomi	35
3.2 <i>Alternative: Kerja Sama Antara Indonesia dan Negara Mitra Melalui Mekanisme LCS</i>	37
3.2.1 Opsi kebijakan <i>Local Currency Settlement</i> Bersama Tiongkok	37

3.2.2. Opsi Kebijakan <i>Local Currency Settlement</i> dengan selain Tiongkok	40
3.3. <i>Consequences</i> : Analisis Konsekuensi Mitra LCS di Indonesia	41
3.3.1. Kerja sama LCS Indonesia-Tiongkok	41
3.3.2. Kerja sama LCS Indonesia-Australia	45
3.4. Choices Indonesia Membangun Daya Tawar serta Memperkuat Kebijakan LCS sebagai <i>Instrumen</i> Ekonomi dengan Tiongkok	49
Bab 4	54
Penutup	54
4.1. Kesimpulan	54
4.2. Rekomendasi	56
4.3. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58

Daftar Tabel

Tabel 1 Neraca perdagangan Indonesia yang defisit	8
Tabel 2 Rata-rata kurs Rupiah ke Dolar AS	9
Tabel 4 Daftar bank ACCD Indonesia dan Tiongkok	25
Tabel 5 Rerata fluktuatifnya nilai rupiah terhadap dolar	31
Tabel 6 Kegiatan ekspor and impor negara mitra.....	41

Daftar Gambar

Gambar 1 Fluktuatif nilai Rupiah terhadap USD	21
Gambar 2 Presentase fluktuatif ekonomi Indonesia pasca Covid-19	23
Gambar 3 Skema Local Currency settlement Indonesia dengan negara mitra.....	24
Gambar 4 Overview penggunaan USD dalam kegiatan ekspor-impor Indonesia.	32

Daftar Singkatan

ACCD	: <i>Appointed Cross Currency Dealer</i>
AIIB	: <i>Asian Infrastructure Investment Bank</i>
ACFTA	: <i>Asean Free Trade Area</i>
APEC	: <i>Asia-pacific economic cooperation</i>
ASEAN	: <i>Association of east Asia nation</i>
BI	: <i>Bank Indonesia</i>
BRI	: <i>Bank Republic Indonesia</i>
BCSA	: <i>Bilateral Currency Swap Agreement</i>
CBDC	: <i>Currency Bank Digital Currency</i>
FED	: <i>Federal Reserve System</i>
GDP	: <i>Gross Domestic Product</i>
LCS	: <i>Local Currency Settlement</i>
LCBSA	: <i>Local Currency Bilateral Swap Agreement</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
PBOC	: <i>People Bank of China</i>

Abstrak

Studi ini menganalisis kerja sama antara Indonesia dan China pada periode 2018–2022 menggunakan pendekatan *Rational Actor Model* (RAM) dari Graham T. Allison. Model ini berasumsi bahwa negara bertindak sebagai aktor rasional yang mengambil keputusan berdasarkan perhitungan biaya dan manfaat guna mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam konteks kerja sama Indonesia-Tiongkok, analisis ini berfokus pada sektor perdagangan, investasi, dan infrastruktur, terutama dalam implementasi *Local Currency Settlement* (LCS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia secara rasional memanfaatkan hubungan bilateral ini untuk mendorong pembangunan infrastruktur, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing dalam transaksi perdagangan. Namun, tantangan seperti defisit neraca perdagangan dengan Tiongkok serta risiko ketergantungan ekonomi menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis. Studi ini menyimpulkan bahwa kebijakan Indonesia dalam kerja sama dengan Tiongkok selama periode ini didasarkan pada perhitungan rasional guna memaksimalkan manfaat ekonomi.

Kata kunci: Indonesia, Tiongkok, *Rational Actor Model*, kerja sama bilateral, kebijakan ekonomi.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok memasuki fase baru setelah menyepakati *Local Currency Settlement* (LCS) pada 30 September 2020. *Memorandum of understanding* (MoU) merupakan kerja sama yang menyepakati akan menggunakan mata uang lokal sebagai alat transaksi (Bank Indonesia 2021). Dalam implementasinya, kerangka kerja sama ini dapat menjadi langkah dalam mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu seperti dolar.

Nilai tukar merupakan satuan harga yang menjadi acuan transaksi dalam perekonomian, kurs suatu negara erat hubungannya dalam mempengaruhi penawaran dan permintaan pasar. Dengan demikian, negara dengan nilai kurs yang stabil dapat dipastikan perekonomian negara tersebut cenderung stabil, Namun sebaliknya, jika kurs mengalami depresiasi, dapat dipastikan negara tersebut ikut tidak stabil sebab nilai tukar memiliki hubungan erat terhadap arus modal masuk, minat investasi asing dan stabilitas perdagangan (Triyono 2008).

Kesenjangan nilai tukar menjadi masalah serta berdampak pada penurunan neraca perdagangan. Hal ini disebabkan nilai tukar yang cenderung fluktuatif sehingga mempengaruhi nilai dari sebuah barang dan jasa. Kondisi ini tergambar pada ketidakstabilan nilai tukar khususnya rupiah terhadap Dolar AS, di mana tergambar pada kejatuhan pasar keuangan di Amerika Serikat (AS) pada tahun 2008. Melalui fenomena tersebut, nilai rupiah yang awalnya berada pada Rp. 8.000 - 9.000 per dolar di tahun 2001 menjadi Rp. 10.000 - 11.000 per dolarnya (R 2015).

Penurunan nilai rupiah meningkat di tahun 2012-2014 hingga menyentuh angka Rp.12.000 - 13.000. Peningkatan depresiasi rupiah yang signifikan ini disinyalir berdampak defisit neraca perdagangan, khususnya di sektor migas, di mana terjadi peningkatan terhadap bahan baku yang mengharuskan impor dan tidak disertai dengan pertumbuhan ekspor (Databooks 2018).

Tabel 1 Neraca perdagangan Indonesia yang Defisit

No	Tahun	Neraca perdagangan Indonesia Tahunan dalam US\$	
1	2008	Rp7.823.100.000	
2	2009	Rp19.680.800.000	
3	2010	Rp22.115.700.000	
4	2011	Rp26.060.900.000	
5	2012	-Rp1.659.200.000	
6	2013	-Rp4.076.800.000	
7	2014	-Rp1.886.100.000	
8	2015	Rp7.698.800.000	
9	2016	Rp8.836.900.000	
10	2017	Rp11.842.700.000	
11	2018	-Rp8.698.500.000	

Sumber : (Databooks, 2018).

Melalui tabel di atas, setidaknya Indonesia mengalami defisit perdagangan secara berturut-turut sejak 2012-2014. Selama tiga tahun itu juga, kebutuhan akan dolar AS meningkat sebab mata uang tersebut masih menjadi alat tukar perdagangan. Ketidakstabilan ekspor dan impor Indonesia dalam tiga tahun tersebut memiliki dampak yang besar pada stabilitas nilai rupiah yang disinyalir dari tingginya kebutuhan akan impor migas. Tidak sampai disitu, tingginya inflasi yang menyebabkan naiknya harga kebutuhan pokok juga menjadi faktor pendorong pelemahan rupiah (Sukirno 2011).

Tabel 2 Rata-rata Kurs Rupiah ke Dolar AS

Tahun	Kurs
2008	Rp10.950
2009	Rp9.480
2010	Rp8.991
2011	Rp9.068
2012	Rp9.570
2013	Rp12.189
2014	Rp12.440
2015	Rp13.000
2016	Rp13.286
2017	Rp13.560
2018	Rp14.000

Sumber : Badan Pusat Statistik dan CNBC

Bagi Indonesia, dampak pada fluktuatifnya dolar AS yang berujung pada krisis yang kerap beberapa kali terjadi. Kondisi depresiasi rupiah terburuk berada di tahun 1998, di mana mencapai pada Rp. 2.000 ke Rp. 16.000. Untuk menstabilkan kondisi ini, pemerintah memberlakukan pinjaman dengan *International Monetary Fund* (IMF) yang berujung pada reformasi ekonomi seperti restrukturisasi sistem perbankan, pelunasan hutang luar negeri di sektor swasta, dan bantuan dana kurang lebih senilai \$11.7 miliar.

Hal ini menegaskan kembali pentingnya menjaga kestabilan nilai mata uang yang digunakan dalam perdagangan internasional, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi depresiasi nilai rupiah. Perlu dianalisis bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespons fenomena depresiasi rupiah tersebut. Merespons terkait isu stabilitas nilai tukar Bank Indonesia kemudian melakukan MoU dengan Malaysia dan Thailand untuk menyepakati kebijakan LCS pada 23 Desember 2016 (“Laporan Perekonomian Indonesia 2016,” n.d.)

Dengan bergabungnya Thailand dan Malaysia, ini dapat menjadi langkah penguatan pasar di kawasan Asia dalam mempromosikan penggunaan mata uang lokal. Dalam hal ini, rupiah, ringgit, dan baht sebagai alternatif transaksi. Dalam catatan Bank Indonesia, penggunaan Bhat telah mencapai \$49 juta sedangkan ringgit sekitar \$125 juta (Alaydrus 2019). Indonesia dan Jepang juga menandatangani MoU pada 5 desember 2019, dan secara efektif berlaku pada 5 Agustus 2021 guna mendorong penggunaan transaksi dan investasi Jepang dan Indonesia menggunakan rupiah dan yen dengan kesepakatan *underlying* sebanyak \$500 ribu (Indonesia 2021).

Tiongkok merupakan merupakan salah satu destinasi terbesar bagi produk Indonesia dengan nilai mencapai \$31,78 miliar. Angka ini senilai dengan 20% total dari total ekspor Indonesia di tahun 2020. Kasan Muhri, Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Kementerian Perdagangan China, berargumen bahwa hal ini dapat meningkatkan daya saing dan mengurangi ketergantungan dengan dolar AS (Widi 2021).

Selain itu, Menurut Bahlil Lahdalia, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menyebutkan performa investasi China cenderung agresif dibandingkan mitra lainnya seperti Jepang (Wildan 2020). BKPM juga melaporkan nilai investasi China di tahun 2019 mencapai \$4,7 miliar, di mana nilai ini dua kali lebih besar dibandingkan tahun 2018, yaitu \$2,4 miliar. Oleh karena itu, China dapat mengeser posisi Jepang sebagai investor Indonesia di peringkat atas dengan \$4,31 miliar di tahun 2019 (Wildan 2020).

Keberlanjutan hubungan ekonomi antara Indonesia dan China menjadi salah satu faktor pendorong terjalannya Nota Kesepahaman (MoU) mengenai penerapan

Local Currency Settlement (LCS) antara rupiah dan yuan. Inisiatif ini dipandang sebagai langkah efisiensi, mengingat tingginya volume impor Indonesia dari China. Penggunaan mata uang lokal dianggap lebih rasional dikarenakan lebih menguntungkan dibandingkan dengan melakukan transaksi melalui dolar AS.

Untuk itu dengan mengetahui urgensi dari isu dominasi mata uang, depresiasi nilai tukar, hingga skema LCS yang digunakan dalam merespons nilai rupiah terhadap dolar AS sebagai *hard currency*.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan yang akan menjadi fokus dalam penulisan ini yaitu Mengapa Indonesia membangun kerja sama dengan Tiongkok melalui kerangka kerja sama *local currency settlement* dalam perspektif *Rational Choice* pada tahun 2020?

1.3. Tujuan Penelitian

Riset ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan tujuan dan kepentingan Indonesia dalam melaksanakan kerangka transaksi menggunakan mata uang lokal
2. Untuk menjelaskan kedekatan Indonesia dan Tiongkok dalam terjalinnya kerja sama *Local Currency Settlement*
3. Untuk menjelaskan faktor-faktor Rasionalitas pemilihan Tiongkok sebagai mitra dari *Local currency settlement*

1.4 Cakupan penelitian

Penelitian ini meliputi kebijakan ekonomi setelah pemerintah Indonesia menandatangani kesepakatan dengan Tiongkok terkait penggunaan mata uang lokal, yaitu Yuan dan Rupiah. Di tahun 2018, bank sentral Indonesia telah menjalin

komunikasi dengan bank sentral Tiongkok terkait kerja sama untuk menggunakan mata uang lokal melalui BCSA, Adapun mitra yang telah menjalin kerja sama ini meliputi Jepang, Singapura, Korea Selatan dan Australia, sehingga mengenai kerja sama menukar mata uang tersebut dapat digunakan untuk mendukung *Local Currency Settlement*.

Dalam konteks ini, terdapat bank-bank tertentu di Indonesia maupun Tiongkok yang dianggap sebagai *the Appointed Cross Currency Dealer (ACCD)*, di mana penunjukkan ini berdasarkan sirkulasi Kesehatan bank dan pengalaman. Di samping itu, kerja sama LCS juga sudah diinisiasi oleh Indonesia Ketika sudah berkerjasama dengan negara Asia Tenggara, yaitu Thailand dan Malaysia, sehingga kerja sama dengan Tiongkok dapat memperbesar kemungkinan Indonesia mendapatkan manfaat seperti harga komoditas yang lebih ekonomis.

1.5 Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan kajian terdahulu terkait kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok di bidang stabilitas ekonomi dan penggunaan mata uang lokal, penulis menemukan kajian-kajian yang memiliki irisan terkait topik dari skema kebijakan *local currency settlement* di Indonesia, sehingga kajian terdahulu tersebut akan menjadi referensi yang mendukung argumentasi dari pada penulisan ini.

Pertama, Penelitian oleh Aprilia Dwi Rasdiyanti, dan Suyeno dengan judul “Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia- Tiongkok” melalui kajian ini penulis menjelaskan kelebihan, kekurangan, tantangan dan peluang dari adanya kerja sama LCS Indonesia dan Tiongkok, kajian ini melihat LCS dari sisi Tiongkok sebagai mitra ekonomi terbesar Indonesia berdampak positif bagi perkembangan dan minat penggunaan mata uang lokal, yang didasari

pada peningkatan volume perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok semakin meningkat, yang pada tahun 2021 nilai ekspor Indonesia ke Tiongkok menyentuh 63,63 miliar USD dibanding dengan nilai impor pada tahun yang sama mencapai 60,71 miliar dolar Amerika Serikat, namun disisi lain kajian ini melihat adanya tantangan atau kerugian mengingat Tiongkok sebagai negara manufaktur terbesar berpotensi mendominasi ekspor Indonesia (Aprilia Dwi Rasdiyanti and Suyeno 2022).

Kedua, kajian oleh Honi Azarine Waranggani dan Shanti Darmastuti di dalam kajian tersebut cukup baik menjelaskan kepentingan Indonesia di dalam melakukan kebijakan LCS dengan Jepang, yang diperkenalkan sebagai mitra sejak 2020 berhasil membawa pertumbuhan perdagangan dengan mata uang lokal senilai \$30 juta, kondisi ini dinilai sebagai suatu pertumbuhan yang positif mengingat keterbatasannya mitra saat itu. Namun, pelaksanaan LCS juga menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Kendala seperti kurangnya kesadaran tentang manfaat LCS, pasar mata uang lokal yang belum stabil, serta keterbatasan infrastruktur pasar keuangan Menjadi perihwal yang harus diperhatikan kedepannya (Waranggani and Darmastuti 2024).

Ketiga, kajian oleh Chalongphob Sussangkarn yang berjudul *Promoting Local Currency Usage in the Region*, penelitian ini membahas maraknya negara-negara di asia yang mulai menunjukan sikap dalam menggunakan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dan investasinya, Tiongkok menjadi negara yang paling serius di dalam memberdayakan untuk internasionalisasi RMB sejak 2013, kebijakan PboC untuk memberdayakan RMB sangat diterima khususnya bagi ASEAN+3 seperti Singapura dengan nominal RMB300 miliar, Korea RMB360

miliar dan Indonesia dengan RMB200 miliar, dengan pertumbuhan yang terbilang masif ini RMB dapat diperhitungkan untuk digunakan sebagai mata uang internasional (Sussangkarn 2019).

Sehingga berdasarkan beberapa literatur yang telah penulis temukan menjelaskan bahwasanya sejak kebijakan *local currency settlement* dikembangkan di tahun 2016 telah melalui banyak penyesuaian serta *progress* yang setiap tahunnya terus berkembang khususnya mitra-mitra baru yang memiliki minat dalam diversifikasi mata uang dalam perdagangan bilateralnya, dengan diperkenalkannya Tiongkok sebagai mitra terbaru LCS pada 22 September 2020, penulis tertarik untuk mengkaji alasan rasional dari pemilihan Tiongkok sebagai mitra, kemudian perkembangan dari prosesi lima tahun berjalannya LCS di Indonesia selama tahun 2018-2022.

1.6 Kerangka Pemikiran

Kajian politik internasional telah banyak melahirkan teori-teori maupun perspektif, di mana salah satunya dipopulerkan oleh Graham T. Allison melalui *Rational choice*. Allison memiliki empat asumsi dasar, yaitu:

Goals and objectives, yakni proses bagi pembuat kebijakan untuk mendeskripsikan dan mengukur setiap konsekuensi dan hasil atau kegunaan dari setiap keputusan. Dengan begitu, pengambil kebijakan akan sangat mempertimbangkan keuntungan, fungsi, dan preferensi. Dari opsi yang tersedia untuk mempertimbangkan skala dari kepentingan tertinggi (tujuan) tersebut akan berhasil (Allison and Allison 1971, 29).

Alternatives, para pemangku kebijakan harus menyediakan opsi alternatif untuk situasi tertentu. adanya opsi alternatif sendiri kendatinya harus menyediakan

spesifikasi-spesifikasi tertentu sebagai suatu tindakan yang tepat untuk membedakan masing-masing antara opsi alternatif yang mana akan mempercepat kepada tujuan akhir. opsi alternatif sendiri digambarkan sebagai skema pohon yang menjalar dalam skema *Decision Making* sendiri dikenal dengan *Decision Tree* dimana opsi alternatif diibaratkan sebagai data-data dari aturan guna mempermudah proses pengambilan keputusan dan menjadi solusi dari permasalahan. (Allison and Allison 1971, 29)

Consequences, dari pilihan alternatif tersebut kemudian dapat distrukturkan opsi mana saja yang memiliki dampak yang paling minimal berarti dalam *Decision Making* aktor pembuat kebijakan harus memilih dan menerima konsekuensi yang paling relevan mulai dari cost, benefit, constraints agar tetap sesuai dengan tujuan akhir atau kepentingan nasional (Allison and Allison 1971, 30)

Choices, tahap analisis dari pemangku kebijakan untuk memilih opsi yang paling memungkinkan sebagai sebuah kebijakan dengan berbagai pertimbangan sebelumnya mencakup konsekuensi serta prediksi yang akurat agar berjalannya kebijakan tersebut menjadi opsi yang paling baik bagi negara perumus kebijakan tersebut. (Allison and Allison 1971, 30)

Dalam menganalisis perumusan kebijakan menurut Graham T Allison selain mempertimbangkan *cost*, *benefit* serta *constraints* untuk menuju pencapaiannya perlu pengoptimalan dari segi domestik dan internasional agar pilihan opsi kebijakan dapat selesai atau sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan nasional negara perumus kebijakan. dalam kasus ini Indonesia dan Tiongkok sebagai aktor yang melakukan kerja sama kesepakatan penggunaan mata uang lokal perlu analisis dan pengamatan yang lebih komprehensif dari segi domestik kedua

negara untuk kemudian dapat diketahui rumusan masalah, hambatan serta apakah kerja sama tersebut telah sesuai dengan kesepakatan awal apa tidak.

Penggunaan teori *rational choice* dalam konteks kerja samasama Indonesia dan China akan dianalisis melalui empat asumsi:

Melalui aspek *goals and objective*, peneliti akan menjelaskan tujuan atas kebijakan *local currency settlement*, di mana bagian ini akan menyakut mengenai urgensi dari kerja sama LCS dengan Cina. Kedua aspek *alternatives*, di mana sebelum terjalannya kerja sama LCS Indonesia dengan China terdapat beberapa opsi mitra lainnya seperti Jepang, Australia, Singapura, dan Korea Selatan. *Consequences*, yakni analisis berupa identifikasi opsi kebijakan yang meliputi *cost*, *benefit*, dan *constraints*. Tahap terakhir, *choices*, yakni rangkuman analisis yang berfungsi sebagai data evaluasi bagi Indonesia setelah melakukan perjanjian LCS dengan China, meliputi dampak setelah Indonesia dan Tiongkok mengimplementasikan LCS dalam hubungan perdagangan.

1.7 Argumen Sementara

Melalui hasil penelitian sementara, penulis menganalisis studi kasus terkait skema *local currency settlement* Indonesia dan Tiongkok menggunakan landasan teori *rational choice* disertai dengan sumber-sumber pendukung yang valid. Penulis menjelaskan beberapa hal, Pertama pemerintah Indonesia sedang membangun skema perdagangan alternatif melalui kebijakan LCS guna mendorong penggunaan mata uang lokal, yang dilandaskan pada terus fluktuatifnya nilai dolar AS terhadap nilai Rupiah. Kemudian dalam perumusan perjanjian LCS Tiongkok bukan satu-satunya opsi mitra yang menunjukkan minat dalam penggunaan mata uang lokal

sehingga perlu bagi penulis untuk menjelaskan faktor pemerintah Indonesia dalam memilih Tiongkok sebagai mitra LCS di tahun 2020.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penulis akan mengaplikasikan metode penelitian deskriptif kualitatif dan analisis melalui studi dokumentasi dengan bahan bacaan dan sumber yang relevan di internet dengan jangka waktu 2018 hingga 2022.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Peneliti akan mendefinisikan pemerintah Indonesia sebagai subjek yang merupakan actor mengambil kebijakan, dan objek penelitian yakni faktor pengambilan Keputusan Pemerintah Indonesia untuk menyepakati perjanjian LCS dengan Tiongkok menggunakan *rational choice*.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan menggunakan studi dokumentasi yang mencakup jurnal, laporan, dan literatur nasional maupun internasional yang tersedia secara online serta relevan terkait hubungan politik ekonomi Indonesia dan Tiongkok di tahun 2018 dan 2022.

1.8.4 Proses Penelitian

Proses pengumpulan data akan dilakukan secara kolektif melalui jurnal, dokumen serta studi perpustakaan dengan seleksi data agar kredibilitasnya terpercaya.

1.9 Sistematika Pembahasan

- Bab I penulis akan menjelaskan serta menguraikan terkait pemilihan judul “analisis kerja sama bilateral Indonesia dan Tiongkok melalui *Local*

Currency Settlement ditinjau dari perspektif Rational Choice tahun 2018 - 2022.

- Bab II penulis akan memaparkan hubungan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok, Transaksi LCS di Indonesia dan perspektif pemangku kebijakan dalam mendorong Kerjasama LCS.
- Bab III akan menganalisis berjalannya hubungan ekonomi Indonesia dan Tiongkok akan berdampak dengan kebijakan *local currency* yang akan direfleksikan dengan kerja sama LCS yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Indonesia dengan negara asia lainnya seperti Thailand Malaysia dan Jepang adapun instrumen yang saya gunakan untuk menganalisis yaitu pendekatan rational menurut Graham T Allison
- Bab ke IV penulisan akan mencakup hasil kesimpulan untuk mengetahui Rasionalitas dari terpilihnya Tiongkok sebagai mitra dalam kerangka *Local Currency Settlement*

BAB 2

Proses Diversifikasi Mata Uang Lokal Sebagai Bentuk Stabilitas Ekonomi

Pada bab I, penulis menjelaskan pentingnya stabilitas mata uang suatu negara yang rentan terhadap fluktuasi, salah satunya disebabkan oleh ketergantungan pada mata uang tertentu, yakni USD sebagai mata uang acuan (*hard currency*). Fluktuasi nilai mata uang menjadi suatu kondisi yang mengkhawatirkan karena pengaruhnya yang besar terhadap stabilitas ekonomi, seperti yang terlihat pada krisis finansial Asia 1997 yang menjadi salah satu pemicu krisis moneter Indonesia pada 1998.

Kondisi moneter yang serupa juga kembali terjadi pada tahun 2008, dan lebih baru lagi diperkirakan akan memicu krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada tahun 2020. Fenomena moneter ini menjadi pendorong bagi berbagai kebijakan efisiensi dalam transaksi bilateral. Di Indonesia, upaya penguatan penggunaan mata uang lokal mulai difokuskan melalui pengembangan strategi yang diperkenalkan pada tahun 2016, dengan melibatkan Malaysia dan Thailand dalam kerangka *Local Currency Settlement*.

Dalam prosesnya kebijakan *local currency settlement* terus berkembang hingga merekrut Tiongkok sebagai mitra terbaru. Untuk itu pada BAB II penulis akan memuat perkembangan hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok, kebijakan stabilitas nilai mata uang, hingga dirumuskannya *local currency settlement* di Indonesia.

2.1. Hubungan bilateral Indonesia dan Tiongkok dalam konteks LCS

Dengan terjalannya nota kesepahaman (MoU) pada 30 September 2020 antara Indonesia dan Tiongkok melalui mekanisme *local currency settlement*, perjanjian ini membawa suatu pendekatan baru dalam mengkaji hubungan bilateral antara kedua negara. Secara deskriptif, MoU tersebut mencerminkan niat kedua negara untuk mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan dolar AS dalam transaksi perdagangan, dengan menggantinya melalui penggunaan mata uang lokal masing-masing. Oleh karena itu, penting bagi penulis untuk mengkaji kondisi ekonomi kedua negara yang menjadi latar belakang terjalannya kerja sama ini.

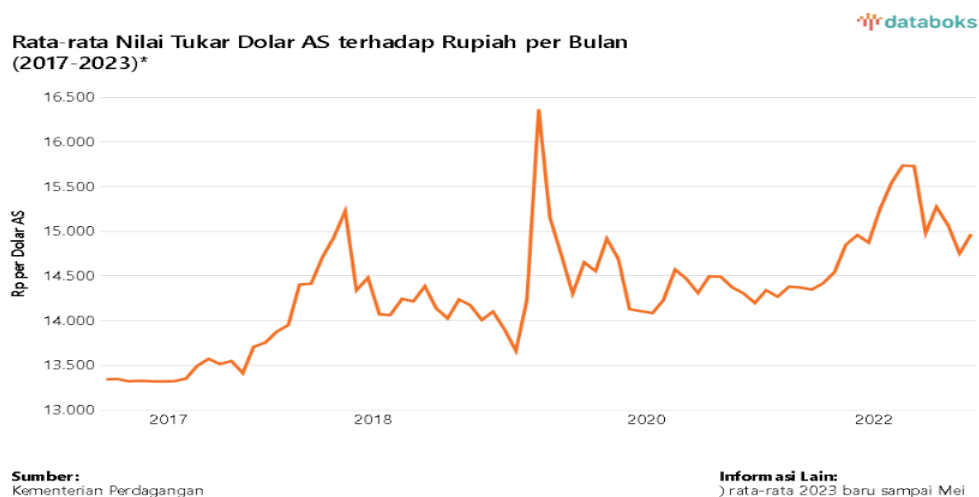
Hubungan ekonomi yang terjalin antara Indonesia dan Tiongkok sejatinya telah lama terjalin salah satunya melalui proyek OBOR pada era SBY (2004-2014) yang menjadi “karpet merah” bagi masuknya banyak proyek kerja sama dalam hal infrastruktur bahkan ekonomi, hasil dari kerja sama ini membawa Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan pertumbuhan tercepat Bersama Tiongkok dan India, dengan nilai perdagangan Indonesia-Tiongkok menyentuh hingga US 70 miliar (Pattiradjawane 2016). Pada kepemimpinan Joko Widodo (2014-2024) hubungan Indonesia and Tiongkok semakin menguat yang digambarkan pada peranan BRI di proyek infrastruktur Indonesia melalui pengembangan kereta cepat jakarta bandung yang sebelum telah dimulai pada era SBY dengan kemitraan Jepang senilai US 6,5 miliar namun kemudian proyek tersebut beralih dengan proposal Tiongkok dengan nominal lebih rendah menjadi US 5,5 miliar serta akses kepada transfer teknologi yang lebih terbuka di banding Jepang (Media 2021).

Hubungan ekonomi antara kedua negara tidak hanya mengalami perkembangan signifikan di sektor infrastruktur, tetapi juga menunjukkan

peningkatan substansial di bidang politik. Salah satu indikator utama dari perkembangan ini adalah bergabungnya Indonesia sebagai anggota *Asian Infrastructure Investment Bank* (AIIB), yang merupakan bagian integral dari inisiatif Belt and Road Initiative (BRI). Kerja sama tersebut turut berkontribusi terhadap peningkatan investasi Tiongkok, yang berhasil menggeser Singapura dengan total nilai investasi mencapai 4,7 miliar dolar AS. Pada periode yang sama, nilai ekspor Tiongkok ke Indonesia tercatat sebesar 25 juta dolar AS, sementara impor dari Tiongkok mencapai 45 juta dolar AS (Rakhmat 2020).

Di tahun 2020 nominal ekspor mengalami peningkatan hingga US 31 miliar namun mengalami penyusutan dari sisi impor menjadi US 7 miliar. Nominal tersebut menjadikan posisi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia nomor dua menggeser Jepang di bawah US serta menjadikan Tiongkok sebagai investor terbesar nomor dua setelah Singapura (Widi 2021). Kemudian melalui kesepakatan MoU pada 30 September 2020 Indonesia Kembali membuka kerja sama baru terkait penggunaan mata uang lokal yang didasarkan pada fluktuatifnya nilai USD sebagai suku Bunga acuan di dalam perdagangan bilateral.

Gambar 1 Fluktuatif Nilai Rupiah Terhadap Dolar AS



Sumber : (Santika 2023)

Fluktuasi nilai tukar dolar AS terhadap rupiah tercatat signifikan dalam periode 2018-2022, yang memberikan dampak substansial terhadap devaluasi rupiah. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi fluktuasi ini adalah kondisi perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, yang menyebabkan depresiasi nilai rupiah hampir 9%, dengan nilai tukar yang tertekan pada kisaran Rp13.000-14.000 per dolar AS (Tan 2018). Selanjutnya, pandemi Covid-19 juga berperan dalam mendorong depresiasi rupiah, yang mencapai Rp15.000 per dolar AS. Fluktuasi nilai tukar yang tinggi ini memberikan dampak signifikan terhadap ketidakstabilan pasar Indonesia, memperburuk kontraksi ekonomi, serta mengindikasikan ketidakefisienan apabila ketergantungan terhadap dolar AS terus dipertahankan dalam kondisi volatilitas yang ekstrem (Putra 2020).

Sehingga berlandaskan efisiensi perdagangan siasat diversifikasi mata uang sebagai bentuk stabilitas ekonomi menjadi salah satu pendekatan dalam merespon kondisi tersebut, mengingat Tiongkok merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia dengan total tujuan ekspor Indonesia mencapai Rp. 380 miliar dolar AS dan sektor impor dengan Rp. 45 juta Dolar AS serta akses investasi Tiongkok di Indonesia mencapai 17% dari total investasi asing Indonesia pada tahun 2019 (Herman 2020). Implikasi sektor ekonomi yang dimiliki atas kemitraan Indonesia dan Tiongkok dapat menjadi siasat guna meminimalisir kontraksi ekonomi yang merupakan dampak dari covid-19 yang diperkirakan akan berdampak pada penurunan ekonomi di Indonesia dengan kondisi terburuk di kuartal kedua, yang diperkirakan penurunan GDP menyentuh -5,3 kondisi ini tentu berimplikasi pada ketidakstabilan kondisi ekonomi (kemenkeu RI 2021).

Sehingga instrumen diversifikasi mata uang sebagai pemulihan ekonomi menggunakan *local currency settlement* dirasa efektif sebagai *Exit Plan* dari keterpurukan pandemi akan lebih condong kepada sektor fiskal dan moneter dibandingkan kesehatan. Sehingga dijelaskan oleh Sri mulyani terkait pentingnya menghindari bergantung pada *hard currency* di saat fluktuatifnya neraca perdagangan seperti ini serta mengingat Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar kedua setelah Singapura menjelaskan pentingnya posisi LCS sebagai instrumen pemulihan ekonomi (Pratama 2022).

Gambar 2 Presentase Fluktuatif Ekonomi Indonesia Pasca Covid-19

Komponen Pengeluaran	2020					2021
	Q1	Q2	Q3	Q4	Y	Q1
Konsumsi RT	2,8	-5,5	-4,0	-3,6	-2,6	-2,2
Konsumsi LNPRT	-5,0	-7,8	-2,0	-2,1	-4,3	-4,5
Konsumsi Pemerintah	3,8	-6,9	9,8	1,8	1,9	3,0
PMTB	1,7	-8,6	-6,5	-6,2	-4,9	-0,2
Ekspor	0,4	-12,0	-11,7	-7,2	-7,7	6,7
Impor	-3,6	-18,3	-23,0	-13,5	-13,5	5,3
PDB	3,0	-5,3	-3,5	-2,2	-2,1	-0,7

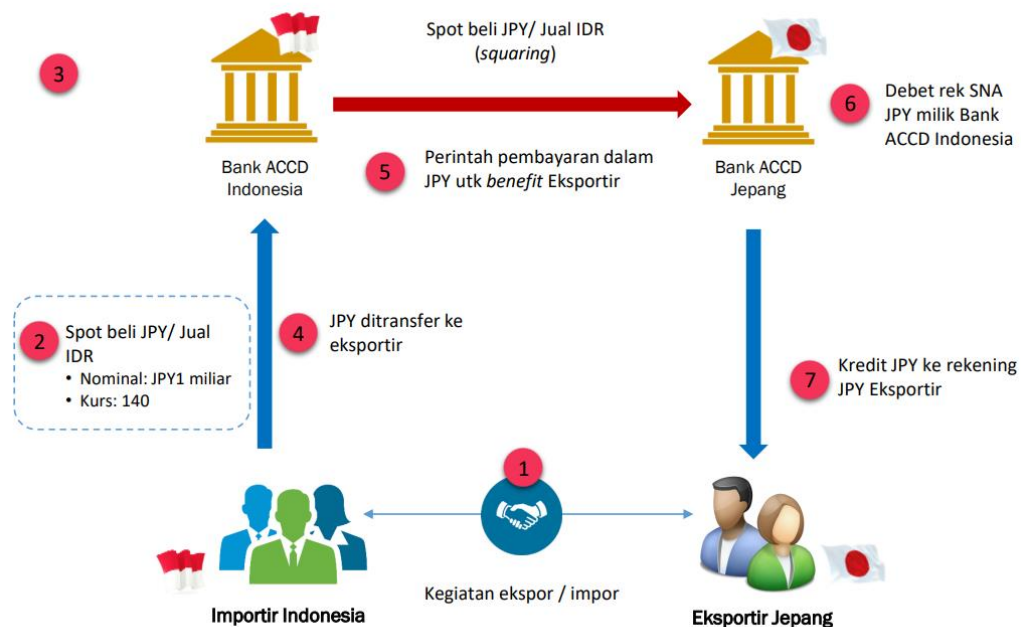
Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

2.2. Transaksi *Local Currency Settlement* yang Berlaku di Indonesia

Penjelasan mengenai hubungan ekonomi antara Indonesia dan Tiongkok memiliki implikasi signifikan dalam upaya meningkatkan efisiensi sektor ekonomi,

khususnya terkait dengan penguatan mata uang Rupiah. Hal ini menjadi semakin relevan mengingat fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap USD yang cenderung meningkat, seiring dengan ketidakpastian ekonomi global. Fluktuasi tersebut berpotensi memperburuk depresiasi Rupiah. Selain itu, dampak pandemi turut memperburuk kondisi neraca perdagangan Indonesia. Oleh karena itu, sangat penting bagi penulis untuk membahas penerapan kebijakan *Local Currency Settlement* melalui skema ACCD dalam konteks ekonomi Indonesia.

Gambar 3 Skema *Local Currency Settlement* dari Indonesia Dengan Negara Mitra



Sumber : (Bank Mandiri 2021)

Transaksi *Local Currency Settlement* (LCS) merupakan suatu bentuk perdagangan bilateral yang dirancang untuk memfasilitasi penggunaan mata uang lokal antara negara mitra LCS. Dengan demikian, pelaksanaan transaksi LCS berpotensi mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan

internasional. Hingga saat ini, Indonesia telah mengakomodasi penggunaan Baht, Ringgit, Yen, dan rencananya, Renminbi. Untuk melakukan transaksi dalam skema LCS, para pelaku ekonomi diwajibkan membuka rekening khusus LCS yang dikenal dengan istilah *Sub Special Purpose Non-Resident Account*. Rekening ini berfungsi untuk menampung sejumlah nominal mata uang lokal yang diperlukan sesuai dengan transaksi yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi, dalam Gambar 3, importir Indonesia akan membeli sejumlah yen melalui perantara bank ACCD, yang selanjutnya digunakan sebagai instrumen pembayaran kepada eksportir Jepang.

Selain dalam perdagangan skema LCS juga dapat digunakan dalam bentuk remitansi (jasa pengiriman uang bagi pekerja asing ke negara asalnya) semisal pekerja Jepang di Indonesia dapat membeli yen melalui bank Indonesia kemudian langsung di transfer ke rekening asal Jepang. dengan fasilitas LCS yang telah dijelaskan diharapkan berdampak pada dominasi USD baik pada perdagangan maupun jasa dapat berkurang.

Tabel 3 Daftar Bank ACCD Indonesia dan Tiongkok

Bank ACCD			
ACCD INDONESIA		ACCD Tiongkok	
BCA	Maybank	<i>Industrial dan Commercial Bank of China</i>	<i>United Overseas Bank of China (ltd)</i>
Bank ICBC	Bank OCBC NISP	Bank of Ningbo	
Bank Mandiri	Bank Permata	Bank of China	
Bank of China	Bank Danamon	Mandiri Shanghai Branch	
BNI	UOB Indonesia	<i>China Construction Bank</i>	
BRI		<i>Agriculture bank of China</i>	
<i>China Cons truction Bank</i>		Maybank Shanghai Branch	

Sumber : (Bank Mandiri 2021)

Kemudian untuk mendukung berjalannya skema dari *Local Currency Settlement* guna mengakomodir kepentingan efisiensi transaksi dan pengembangan mata uang yang menjadi kepentingan bank Indonesia dalam mengembangkan mata uangnya. Dalam operasinya kedua bank sentral akan menunjuk dan menyepakati daftar bank yang dapat digunakan dalam melaksanakan skema LCS. Sehingga bagi para pelaku eksportir maupun importir Indonesia dalam transaksi bilateralnya dapat menggunakan Rupiah dan dibayar dengan Rupiah atau dengan mata uang negara mitra yang disepakati oleh bank ACCD dalam hal ini ialah bank-bank milik Tiongkok, sebaliknya pelaku usaha di Tiongkok dapat dengan fleksibel untuk menerima pembayaran dengan mata uang Rupiah maupun Renminbi (CNY) (Webinar Bank Mandiri 2021). Fleksibilitas dari penggunaan mata uang yang menjadikan penggunaan LCS akan memudahkan perdagangan bilateral Indonesia untuk tidak selalu condong terhadap volatilitas dari dolar AS yang dalam kurun waktu lima tahun terakhir terus menguat (Rp15.223 per USD) akan berdampak pada defisit maupun tidak efisiennya perdagangan sebab kondisi nilai tukar erat berpengaruh pada minat ekspor dan impor (Tziamalis and Wang 2022).

Setahun setelah diberlakukannya kesepakatan kerja sama LCS antara Indonesia dan Tiongkok, diperkirakan akan terjadi pertumbuhan yang signifikan. Menurut Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, nilai transaksi LCS pada tahun 2020 tercatat sebesar 2,53 miliar USD, dan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan sebesar 10% pada tahun berikutnya. Dengan Tiongkok sebagai mitra terbaru dalam pengembangan LCS, diharapkan kerja sama ini dapat meningkatkan kegiatan ekspor-impor Indonesia, yang berfokus pada sektor manufaktur,

pertambangan, dan pertanian, serta menjadikan Tiongkok sebagai salah satu mitra utama dalam tujuan ekspor-impor Indonesia (Webinar Bank Mandiri 2021).

2.3. Pandangan Pemangku Kebijakan dalam Mendorong Kerja Sama LCS

Pemahaman terhadap mekanisme LCS penting untuk mengakomodasi kepentingan Indonesia dalam mengurangi ketergantungan terhadap *Hard Currency*, khususnya USD. Melalui LCS, transaksi dengan negara mitra dapat dilakukan tanpa melalui konversi mata uang terlebih dahulu, sekaligus berfungsi sebagai salah satu inisiatif dalam pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Duta Besar Indonesia untuk China, Djauhari Oratmangun, mengatakan bahwa kerja sama ini didorong atas kesadaran bahwa kedua negara memiliki hubungan kuat dari segi investasi. Misalnya di tahun 2021, total investasi kedua negara di tahun 2021 mencapai \$2,5 miliar (Webinar Bank Mandiri 2021). Selaras dengan argumen tersebut, Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Rahmatullah Sjamsuddin, menjelaskan bahwa kerja sama LCS merupakan langkah panjang Indonesia untuk mengurangi penggunaan dolar (Webinar Bank Mandiri 2021).

Di tahun 2021, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui Badan Keahlian menganalisis langkah tersebut. Meskipun masih dihadapi tantangan seperti fasilitas yang ditawarkan LCS masih minim, DPR memperlihatkan setidaknya empat manfaat, yaitu konversi transaksi terhadap valuta asing lebih efisien, terdapat alternatif dalam pembiayaan, eksposur terhadap mata uang, dan tersedia alternatif lindung nilai dalam mata uang lokal

Peneliti ekonomi sekaligus mantan Menteri Keuangan (2013-2014), Chatib Basri mengatakan perumusan untuk menguatkan mata uang lokal sebagai awal yang baik mengingat diversifikasi mata uang, namun kendati demikian kemampuan dari kebijakan penggunaan mata uang lokal sebagai transaksi pengganti dolar belum cukup mumpuni sehingga harus ada peran pemerintah untuk lebih memperhatikan instrumen keuangan guna mendorong kinerja ekspor dan impor untuk menggunakan fasilitas LCS (Wahyudi 2022).

Kementerian Perdagangan Indonesia bekerja sama dengan Center of Indonesia Reform on Economics (CORE) di tahun 2021, penelitian yang dilakukan dimulai dari menggaris bawahi penggunaan dolar terhadap ekspor dan impor Indonesia. Misalnya, penggunaan dolar pada ekspor di tahun 2020 ada pada 93,8% dan Yuan hanya 1,0%. Oleh karena itu, dorongan untuk menggunakan LCS cukup besar meskipun tantangan juga besar. CORE mencatat jika LCS ini berhasil, maka hubungan Indonesia dan Cina semakin kuat, dan berpotensi untuk membuat Indonesia sangat bergantung terhadap Cina. Artinya, jika terjadi penurunan terhadap pertumbuhan ekonomi Cina, maka Indonesia akan berdampak secara signifikan. Di sisi lain, CORE menjelaskan bahwa dibutuhkan *Bilateral Swap Arrangements* (BSAs) untuk menjaga stabilitas keuangan global dan regional (“CORE Indonesia,” n.d.).

Kemudian presiden RI Joko Widodo (Jokowi) juga menunjukkan sikap untuk mendukung perluasan dari pada penggunaan mata uang lokal pada Oktober 2019 bersama dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sepakat untuk memperpanjang kerja sama keuangan bilateral antara Bank Indonesia (BI) dan *Monetary Authority of Singapore* (MAS). BI dan MAS pada 5 November

mengumumkan perpanjangan kebijakan menukar mata uang lokal selama satu tahun dengan nilai SG\$ 9,5 miliar atau Rp 100 triliun atau setara US\$ 7 miliar (Pransuamitra 2020b),

Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan Indonesia pada periode 2019-2023, menyatakan dukungannya dalam siasat penguatan mata uang lokal ditengah fluktuasinya pasar global akibat pandemi yang mengakibatkan banyak negara maju mengetatkan kebijakan finansialnya yang berakibat dengan penarikan stimulus modal atau investasi modal asing menjadi rentan mengingat Indonesia masih menggunakan dolar AS sebagai acuan dalam suku bunganya (Suroyo and Nangoy 2022). Untuk itu penguatan mata uang lokal melalui *Local currency settlement* menjadi salah satu agenda utama dalam presidensi Indonesia pada G20 2022 sebagai bentuk promosi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral.

Bab 3

Teori *Rational Choices* dari Graham T. Allison: Kerja Sama LCS Antara Indonesia dan Tiongkok

Bab kedua telah membahas hubungan ekonomi antara Indonesia dan China dalam konteks transaksi menggunakan mata uang lokal. Namun, pembahasan tersebut belum mencakup beberapa aspek penting terkait *local currency settlement* (LCS) *framework*, seperti sejauh mana kerangka ini berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia, efektivitas LCS dalam mengatasi dominasi mata uang asing, serta mekanisme *check and balance* yang diterapkan Indonesia sebagai proyeksi jangka panjang dari kerja sama mata uang lokal ini.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, penulis akan menggunakan perspektif *rational choice* dari Graham T. Allison. Teori ini menitikberatkan pada pengambilan keputusan oleh negara sebagai aktor rasional dalam menentukan kebijakan ekonomi dan strategi keuangan.

3.1. Goals and Objective: Local Currency Settlement Sebagai Upaya Stabilitas Nilai Rupiah

Pasar valuta asing (valas) Indonesia rentan terhadap ketidakpastian global. Indonesia telah mengalami beberapa kali tekanan yang menyebabkan depresiasi rupiah, yaitu penurunan nilai tukar rupiah terhadap mata uang lain, terutama dolar AS, yang berstatus sebagai *hard currency*—mata uang dengan jangkauan penggunaan luas dan nilai tukar yang relatif stabil. Laporan Bank Indonesia tahun 2018 menunjukkan bahwa depresiasi rupiah dipicu oleh ketidakpastian pasar global akibat instabilitas perekonomian dunia pada tahun tersebut.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi global disebabkan oleh ketimpangan dalam kondisi dan komposisi aktivitas ekonomi di berbagai negara. Laporan Bank Indonesia menjelaskan bahwa pada triwulan II tahun 2018, pertumbuhan ekonomi dunia cenderung tidak stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi AS yang meningkat menjadi sekitar 2,9% dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 2,2%. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Jepang serta negara-negara di kawasan Eropa terus melambat, yang mengakibatkan turunnya permintaan dan melemahnya konsumsi domestik. Hal serupa juga dialami oleh Tiongkok akibat kebijakan *deleveraging*, yaitu pengetatan sektor domestik guna memitigasi risiko pasar. Pada saat yang sama, kinerja ekspor Tiongkok mengalami tekanan akibat memburuknya hubungan dagang dengan AS (Bank Indonesia 2018, 32).

Tabel 4 Rata-Rata Nilai Rupiah Terhadap Dolar Tahun 2018

Bulan	Nilai Dolar Terhadap Rupiah
-------	-----------------------------

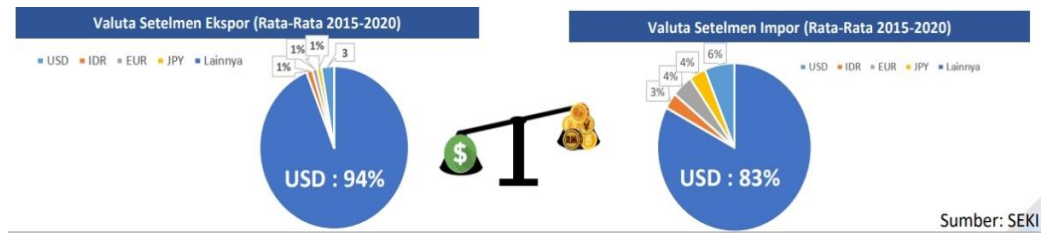
Desember	14,481.00
November	14,339.00
Oktober	15,227.00
September	14,929.00
Agustus	14,711.00
Juli	14,413.00
Juni	14,404.00
Mei	13,951.00
April	13,877.00
Maret	13,756.00
Februari	13,707.00
Januari	13,413.00

Sumber : Kementerian Perdagangan

Jalur finansial mengalami gejolak setelah kenaikan suku bunga kebijakan moneter AS (Fed Funds Rate/FFR). Pada 2018, The Fed menaikkan FFR sebanyak empat kali, dengan total kenaikan yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Perkembangan ini mendorong penguatan dolar AS secara global dan menyebabkan arus masuk modal asing ke negara berkembang menurun tajam.

Berdasarkan laporan Bank Indonesia, arus modal asing ke negara berkembang turun dari 102 triliun dolar AS pada 2017 menjadi 8 triliun dolar AS pada 2018. Kenaikan suku bunga, penguatan dolar, serta peningkatan penggunaan valuta asing (valas) akibat lonjakan impor berdampak pada kestabilan nilai rupiah. Tekanan terhadap rupiah dari Februari hingga Oktober 2018 tercatat mencapai 12%, dengan nilai tukar menyentuh Rp15.235 per dolar AS (Bank Indonesia 2018, 58).

**Gambar 4 Overview Penggunaan Dolar dalam
Kegiatan Ekspor-Impor Indonesia**



Sumber : Rahmatullah 2021

Depresiasi nilai rupiah tidak hanya disebabkan oleh ketidakpastian global. Berdasarkan data perdagangan valuta Indonesia tahun 2015–2020, penggunaan USD menunjukkan statistik yang tinggi, bahkan mendominasi, dengan proporsi di sektor ekspor dan impor melebihi 50% dari total perdagangan bilateral Indonesia (lihat Gambar 4). Ketergantungan terhadap USD semakin memperburuk ketidakstabilan nilai rupiah. Akibatnya, ketika nilai tukar rupiah melemah terhadap USD, harga barang impor menjadi lebih mahal. Karena banyak barang impor merupakan bahan baku, kenaikan harga tersebut meningkatkan biaya produksi, yang pada akhirnya menyebabkan kenaikan harga produk dan mendorong inflasi (GIANIE 2020).

3.1.1. LCS sebagai Strategi Kurangi Eksposur USD dalam Perdagangan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjukkan dukungan yang jelas terhadap kebijakan *Local Currency Settlement* (LCS) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperkuat ekonomi Indonesia. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Plus Three ke-33, Presiden Jokowi menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan kawasan terhadap satu mata uang melalui implementasi efektif kerja sama *currency swap* serta peningkatan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan lintas negara. Menurut Presiden Jokowi,

ketergantungan pada satu mata uang sangat memprihatinkan dan mengkhawatirkan karena dapat merusak sistem perdagangan multilateral, mengganggu pertumbuhan ekonomi kawasan dan nasional, serta menyebabkan fluktuasi nilai tukar (Musyaffa 2018).

Bank Indonesia (BI) mendukung stabilitas nilai tukar rupiah yang sering berfluktuasi terhadap mata uang kuat seperti dolar AS. Sesuai dengan Peraturan BI Nomor 22/12/2020 tentang *Local Currency Settlement* (LCS), kebijakan ini mengalihkan transaksi perdagangan dan investasi internasional ke mata uang lokal. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak gejolak pasar global, meningkatkan daya saing perdagangan, serta memperkuat kemandirian ekonomi Indonesia dalam pembayaran internasional. Dengan dukungan BI, pemerintah memperkenalkan LCS sebagai bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global. (“Bank Indonesia,” 2020, 2).

Melalui LCS, Indonesia dapat memperkuat ketahanan ekonomi domestiknya, karena perdagangan bilateral dapat dilakukan dengan mata uang lokal masing-masing negara mitra. Ini mengurangi ketergantungan pada mata uang eksternal seperti dolar, yang rentan terhadap fluktuasi pasar global. Selain itu, penggunaan LCS dapat mengurangi biaya transaksi, mempermudah aliran dana, dan mempercepat proses penyelesaian transaksi antara negara mitra .

Di sisi lain, dengan LCS, Indonesia dapat menarik lebih banyak investasi langsung dari negara-negara mitra tanpa harus melalui konversi mata uang dolar, yang sering kali melibatkan biaya dan risiko tambahan. Oleh karena itu, LCS menjadi salah satu strategi yang dapat membantu Indonesia untuk memperkuat

posisinya di pasar internasional, sekaligus menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih stabil dan efisien.

Penjelasan Rahmatullah Sjamsuddin menggaris bawahi betapa pentingnya kebijakan *Local Currency Settlement* (LCS) dalam meningkatkan ketahanan ekonomi Indonesia. Dengan volume perdagangan yang terus meningkat, khususnya dengan Tiongkok dan Jepang, yang masing-masing mencatatkan angka \$60 miliar dan \$30 miliar per tahun, penggunaan mata uang lokal dalam transaksi internasional dapat mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan memberi Indonesia lebih banyak kendali atas kestabilan nilai tukar serta perdagangan internasionalnya (Webinar Bank Mandiri 2021).

3.1.2. Mendorong Diversifikasi Mata Uang Dukung Stabilitas Ekonomi

Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, dengan dukungan penuh dari Bank Indonesia (BI), telah mempercepat implementasi *Local Currency Settlement* (LCS) untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan mendiversifikasi mata uang dalam perdagangan internasional. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada dolar AS, yang sering mengalami fluktuasi yang mempengaruhi stabilitas nilai tukar rupiah.

Sejak 2018, Indonesia telah menjalin kerja sama LCS dengan beberapa negara mitra, dimulai dengan Malaysia dan Thailand, diikuti oleh Jepang pada 2020, dan China pada 2021. Dengan semakin banyaknya negara mitra yang terlibat, Indonesia semakin mampu memitigasi risiko nilai tukar yang disebabkan oleh volatilitas pasar global dan memperkuat ketahanan ekonomi domestik. Dengan

percepatan implementasi LCS, Indonesia tidak hanya memperkuat ketahanan ekonomi dalam jangka panjang, tetapi juga membuka peluang untuk mengoptimalkan penggunaan mata uang lokal dalam skala yang lebih luas, yang tentunya akan mendukung stabilitas ekonomi dan meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional (Wahyudi 2021).

Implementasi LCS ini juga menjadi salah satu cara untuk mendiversifikasi mata uang yang digunakan dalam transaksi perdagangan dan investasi internasional. Hal ini mendukung kebijakan ekonomi Indonesia untuk memperkenalkan lebih banyak mata uang lokal dalam perdagangan bilateral, seperti ringgit Malaysia, baht Thailand, yen Jepang, dan yuan China, yang mengurangi ketergantungan pada dolar AS.

Lebih lanjut, LCS memberikan manfaat langsung, seperti efisiensi dalam transaksi perdagangan antar negara mitra, mengurangi biaya konversi mata uang, dan mempercepat proses transaksi. Langkah ini juga berpotensi meningkatkan daya saing Indonesia di pasar global, memperluas akses ke pasar negara mitra, dan menarik lebih banyak investasi dari luar negeri.

Sehingga *Local Currency Settlement framework* akan menjadi alternatif penyelesaian transaksi perdagangan dengan negara mitra dengan mendorong penggunaan mata uang lokal melalui skema LCS diharapkan secara perlahan mengurangi konsentrasi penggunaan mata uang dolar AS dalam transaksi ekspor-impor. Selanjutnya Bank Indonesia akan terus memperkuat dan memperluas kerja sama bilateral dengan bank sentral negara mitra untuk meningkatkan penggunaan

mata uang lokal dalam penyelesaian transaksi perdagangan bilateral atau *local currency settlement* (LCS) (Bank Indonesia 2018, 61,79).

3.2. *Alternative*: Kerja Sama Antara Indonesia dan Negara Mitra Melalui Mekanisme LCS

Dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar melalui penggunaan mata uang lokal, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap USD dalam perdagangan bilateral. Untuk memaksimalkan kepentingan tersebut, Indonesia perlu melibatkan mitra dagang yang memiliki kesamaan visi dalam diversifikasi mata uang. Hal ini terlihat dari pemilihan mitra sebelumnya, seperti Malaysia, Thailand, dan Jepang, yang lebih dahulu menunjukkan komitmen dalam mengurangi dominasi USD dalam perdagangan bilateral mereka. Dengan demikian, memperluas kerja sama dalam *local currency settlement* (LCS) menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan signifikansi kebijakan ini, baik dalam aspek perdagangan, investasi, maupun peningkatan minat terhadap penggunaan mata uang lokal.

3.2.1. Opsi kebijakan *Local Currency Settlement* Bersama Tiongkok

Dalam pelaksanaannya, kebijakan *Local Currency Settlement* (LCS) merupakan bagian dari Jaring Pengaman Keuangan Internasional (JPKI) yang bertujuan memperkuat ketahanan keuangan melalui kerja sama dengan otoritas moneter negara mitra. Sebelum diterapkannya LCS, Bank Indonesia (BI) telah memiliki skema penguatan mata uang lokal melalui kebijakan *Bilateral Currency Swap Agreement* (BCSA). BCSA merupakan kebijakan bank sentral yang

memungkinkan pertukaran mata uang dalam jumlah tertentu untuk jangka waktu yang telah disepakati.

Tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan akses langsung ke mata uang asing tanpa harus bergantung pada pasar valuta asing, membantu menjaga stabilitas keuangan ketika terjadi tekanan terhadap nilai tukar, serta menjamin likuiditas dalam mata uang tertentu untuk keperluan darurat atau perdagangan internasional (Bank Indonesia 2018, 79).

Secara fungsi komunikasi, *currency swap* antara Indonesia dan negara mitra berperan dalam mendukung kebijakan Bank Indonesia (BI) lainnya, yaitu *Local Currency Settlement* (LCS). Negara mitra dalam skema LCS juga harus memiliki minat terhadap diversifikasi mata uang. Selain itu, keempat negara mitra sebelumnya merupakan mitra dagang strategis terbesar bagi Indonesia, sehingga kerja sama ini dapat memperkuat landasan bagi perluasan implementasi LCS ke mitra berikutnya.

Kebijakan *Currency swap* tersebut telah Bank Indonesia lakukan secara bilateral dengan beberapa bank sentral, yaitu:

- ***Bank of Japan*** Perjanjian kerja sama BSA Indonesia-Jepang pertama kali ditandatangani pada 17 Februari 2003 dan terus diperpanjang hingga 14 oktober 2018 dan akan terus diperpanjang hingga 3 tahun kedepan, Adapun nilai *currency swap* mencakup \$22,76 miliar yang dapat ditukar baik secara USD maupun Yen (Bank Indonesia 2018, 79).
- ***People's Bank of China*** hubungan BI dalam menukar mata uang dengan bank sentral Tiongkok telah terjalin sejak maret 2009, yang juga

diperpanjang hingga November 2018 dengan nilai CNY200 miliar atau atau senilai Rp 440 triliun angka tersebut naik dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yakni CNY100 miliar (Pransuamitra 2020a).

- **Bank of Korea** kebijakan *Currency Swap* BI dengan BoK terjalin sejak 6 maret 2017 dengan nilai KRW11,7 triliun, Menko Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dan Mendag Korsel Yoo Myung Hee pun mengapresiasi penandatanganan *Bilateral Currency Swap Arrangement* (BCSA) antara Bank Indonesia dan Bank of Korea pada 5 Maret 2020 lalu. Dengan eksposur mata uang yang konsisten KRW10,7 triliun atau Rp115 triliun (Kementrian Koordinator bidang perekonomian Indonesia 2020).
- **Reserve Bank of Australia** kerjasama *swap* terbaru ditandatangani pada 16 November 2018 lalu, dan berlaku selama 3 tahun. Nilai kerja sama ini mencapai AU\$10 miliar atau sekitar Rp100 triliun (Bank Indonesia 2018, 80)
- **Monetary Authority of Singapore** Komitmen Bank Indonesia dan MAS dalam menggunakan kebijakan *Currency Swap* masing-masing sebesar USD7 miliar 5 November 2018, kemudian di perpanjang melalui realisasi kesepakatan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dengan nilai US\$10 miliar untuk periode satu tahun ke depan (Setiaji 2019).

Dari berbagai opsi bank sentral yang menunjukkan minat dalam penggunaan mata uang lokal, Tiongkok menjadi mitra dengan minat terbesar dibandingkan bank sentral lainnya. Hal ini sejalan dengan *goals* dan *objectives* Indonesia dalam merumuskan kebijakan *Local Currency Settlement* (LCS), yang bertujuan

mendukung diversifikasi mata uang serta mengurangi ketergantungan terhadap USD.

3.2.2. Opsi Kebijakan *Local Currency Settlement* dengan selain

Tiongkok

Ke depannya, kerja sama *Local Currency Settlement* (LCS) ini akan terus diperluas dengan mitra dagang utama Indonesia lainnya di kawasan, seperti China, Korea, India, atau negara-negara mitra lain yang dapat mendukung kepentingan Bank Indonesia (BI) dan Indonesia. Perluasan ini bertujuan untuk memperkuat stabilitas ekonomi dan mendorong diversifikasi mata uang dalam perdagangan internasional. (“Blueprint-Pengembangan-Pasar-Uang-2025.Pdf,”2020.). Melalui blueprint tersebut, pemerintah Indonesia memiliki opsi untuk tidak memilih Tiongkok sebagai mitra LCS, mengingat ada banyak bank sentral lain yang juga terus memperpanjang kebijakan penggunaan mata uang lokal, seperti Australia, Korea Selatan, dan Singapura. Namun, meskipun ada beberapa pilihan mitra, Indonesia lebih condong memilih Tiongkok sebagai mitra LCS pada tahun 2020. Alasan utama di balik keputusan ini kemungkinan besar terkait dengan beberapa faktor strategis, seperti kedekatan ekonomi Indonesia dengan Tiongkok sebagai mitra dagang utama, potensi peningkatan volume perdagangan, serta keinginan untuk memperkuat hubungan ekonomi dengan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Selain itu, Tiongkok memiliki komitmen yang kuat dalam diversifikasi mata uang dan memperkenalkan kebijakan yang mendukung penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral.

3.3. Consequences : Analisis Konsekuensi Mitra LCS di Indonesia

Dengan beberapa mitra bank sentral Indonesia yang menunjukkan minat dalam menggunakan mata uang lokal, seperti Australia, Korea Selatan, Singapura, dan Tiongkok, Indonesia telah melaksanakan kerja sama LCS dengan Korea Selatan pada tahun 2024, Singapura pada tahun 2023, dan komunikasi LCS dengan India juga telah terjalin pada tahun 2024. Dalam hal ini, penulis akan menganalisis konsekuensi dari opsi Tiongkok dan Australia sebagai mitra LCS dengan mengukur manfaat, biaya, serta hambatan yang mungkin timbul dari kehadiran keduanya. Analisis ini bertujuan untuk melihat pengaruh keduanya dalam memengaruhi signifikansi jalannya LCS di tahun 2020.

Tabel 5 Kegiatan Ekspor dan Impor Negara Mitra

No	Top 10 Negara Tujuan Ekspor (rata-rata 2013-2020)			No	Top 10 Negara Asal Impor (rata-rata 2013-2020)		
	Asal	Nilai (USD Miliar)	Pangsa (%)		Asal	Nilai (USD Miliar)	Pangsa (%)
1	Tiongkok	22.63	13.6%	1	Tiongkok	34.98	21.4%
2	Jepang	18.07	10.9%	2	Singapura	19.99	12.2%
3	Amerika Serikat	17.10	10.3%	3	Jepang	15.38	9.4%
4	Singapura	13.08	7.9%	4	Malaysia	9.08	5.6%
5	India	12.10	7.3%	5	Thailand	9.02	5.5%
6	Malaysia	8.53	5.1%	6	Korea Selatan	9.01	5.5%
7	Korea Selatan	8.10	4.9%	7	Amerika Serikat	8.52	5.2%
8	Thailand	5.86	3.5%	8	Australia	5.29	3.2%
9	Filipina	5.37	3.2%	9	India	3.72	2.3%
10	Taiwan	5.22	3.1%	10	Jerman	3.61	2.2%
	TOTAL	166.55	100.0%		TOTAL	163.24	100.0%

Sumber (Webinar Bank Mandiri 2021)

3.3.1. Kerja sama LCS Indonesia-Tiongkok

Benefit : Volume Perdagangan yang Besar

Sektor perdagangan yang besar menjadikan Tiongkok sebagai mitra dagang utama terbesar bagi Indonesia pada tahun 2020, dengan nilai rata-rata ekspor mencapai 13,6% dan impor sebesar 21,4%, sehingga total perdagangan Indonesia

dengan Tiongkok mencapai 35% dari total perdagangan Indonesia. Kondisi ini membuat Tiongkok lebih unggul dibandingkan mitra lainnya, seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, Australia, bahkan Amerika Serikat (lihat Tabel 6).

Pada 2019, Tiongkok menjadi sektor ekspor terbesar dengan nilai mencapai US\$ 25,8 juta, setara dengan Rp 380 miliar atau sekitar 16,68% dari total ekspor Indonesia. Di tahun yang sama, Tiongkok juga menjadi sektor impor terbesar dengan nilai US\$ 44,5 juta atau sekitar 29,95% dari total impor Indonesia. Selain itu, Tiongkok menjadi investor terbesar kedua di Indonesia dengan total investasi senilai US\$ 4,7 miliar, yang setara dengan 17% dari total investasi yang masuk ke Indonesia. Peningkatan investasi Tiongkok ini mulai menggeser dominasi Singapura sebagai investor utama Indonesia (Rakhmat 2020).

Stabilitas dan Internasionalisasi Yuan

Mengurangi penggunaan USD dalam perdagangan untuk memitigasi efek ketidakstabilan nilai rupiah yang rentan terhadap ketidakpastian pasar global menjadi salah satu kebijakan yang terus didorong sejak 2018. Kebijakan ini ditandai dengan terus diperbaruinya *Bilateral Currency Swap Agreement* (BCSA) dengan mitra dagang strategis yang juga menunjukkan minat untuk menggunakan mata uang lokal.

Kesepakatan *currency swap* dengan People's Bank of China (PBoC) kembali diperpanjang pada tahun 2020, dengan nominal yang meningkat dari sebelumnya CNY 100 miliar menjadi CNY 200 miliar, atau setara dengan sekitar Rp 400 triliun (Bank Indonesia 2018, 79). Bekerja sama dengan China melalui *Local Currency Settlement* (LCS) memungkinkan Indonesia memanfaatkan yuan sebagai alat tukar yang relatif stabil dibandingkan USD, sekaligus memperkuat

hubungan ekonomi strategis antara kedua negara. Meskipun mitra lainnya juga menunjukkan minat untuk menggunakan mata uang lokal melalui *Bilateral Currency Swap Agreement* (BCSA) dengan Indonesia, minat terhadap yuan milik Tiongkok jauh lebih besar dan lebih populer dibandingkan dengan mata uang dari mitra lainnya.

Penguatan Hubungan Strategis Bilateral

Penggunaan mata uang Renminbi (RMB), atau yang lebih akrab disebut yuan, telah diterapkan dalam perdagangan Indonesia. Berdasarkan data tahun 2018, setidaknya 10 persen perdagangan Indonesia telah menggunakan RMB. Pada tahun yang sama, nilai kliring yuan telah mencapai 201,2 miliar yuan, atau sekitar 63 persen dari seluruh pasar Indonesia. Besarnya nilai kliring ini membuat Bank of China mempertahankan pangsa pasar terbesar di Indonesia dalam hal nilai kliring (Nurul Ulya, 2019). Pertumbuhan pesat proyek infrastruktur yang didorong oleh kerja sama dengan *Belt and Road Initiative* (BRI) juga turut mendukung penggunaan Renminbi. Menurut laporan SWIFT 2017, Indonesia telah terespos dengan nilai transaksi sebesar RMB 215 miliar (Laucereno 2019).

Dengan memilih China sebagai mitra, Indonesia tidak hanya mendapatkan keuntungan dalam efisiensi perdagangan, tetapi juga memperkuat hubungan dengan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia. China memiliki pasar yang besar dan terus berkembang, yang menawarkan peluang besar bagi produk Indonesia. Implementasi *Local Currency Settlement* (LCS) mempermudah akses pasar ini dan meningkatkan daya saing eksportir Indonesia. Di sisi lain, mitra seperti Australia atau Korea Selatan memiliki pasar yang lebih kecil, sehingga dampak dari implementasi LCS terhadap ekonomi Indonesia akan lebih terbatas. Oleh karena

itu, kerja sama dengan China memberikan dampak yang lebih signifikan dalam mendorong pertumbuhan perdagangan dan ekonomi Indonesia.

Cost Sektor Domestik Indonesia rentan Ketergantungan pada Tiongkok

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kestabilan ekonomi Tiongkok memiliki pengaruh besar terhadap sektor riil ekonomi Indonesia. Menurutnya, penurunan 1% dalam pertumbuhan ekonomi Tiongkok dapat berdampak sebesar 0,3% pada sektor domestik Indonesia. Dilansir dari media BBC pada kuartal pertama tahun 2020, Tiongkok mengalami penurunan indeks ekonomi hampir 7% akibat kebijakan untuk memperketat sektor manufakturnya sebagai respons terhadap pandemi.

Bahlil Lahadalia mengingatkan bahwa Indonesia sangat bergantung pada Tiongkok, sehingga penting bagi Indonesia untuk memanfaatkan momentum pandemi ini sebagai kesempatan untuk melakukan evaluasi dan menciptakan strategi agar tidak terlalu bergantung pada ekonomi Tiongkok (CNN Indonesia 2020).

Constraint Kepentingan Politik Tiongkok dapat menjadi Penghambat

Perang dagang antara AS dan Tiongkok juga menghadirkan beberapa perspektif terkait kebijakan moneter yang diterapkan oleh negeri tirai bambu tersebut. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kebijakan bank sentral Tiongkok dalam melakukan devaluasi mata uangnya, yang menyebabkan harga produk-produk Tiongkok menjadi lebih murah. Hal ini dikhawatirkan dapat menciptakan ketidakadilan kompetitif di pasar internasional.

Beberapa media barat bahkan menyoroti sikap devaluasi mata uang ini sebagai bentuk *currency manipulation*, yang dianggap tidak sehat dan dapat merusak keseimbangan perdagangan global. Langkah ini menambah ketegangan dalam hubungan perdagangan internasional dan menjadi salah satu isu yang sering dibahas dalam konteks perang dagang antara AS dan Tiongkok (BBC 2020).

3.3.2. Kerja sama LCS Indonesia-Australia

Benefit : Indonesia Australia Comprehensive Economic partnership agreement

Dapat diketahui bahwa Australia tidak hanya menunjukkan minat dalam diversifikasi mata uang, tetapi juga memiliki konsistensi yang baik dalam mengakomodasi penggunaan mata uang lokal. Hal ini terlihat dari terus diperpanjangnya *currency swap* antara Indonesia dan Australia sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2015. Kesepakatan tersebut terus diperpanjang setiap tiga tahun, dengan nilai mencapai A\$10 miliar, atau sekitar Rp 100 triliun. Keberlanjutan kerja sama ini mencerminkan komitmen kedua negara untuk memperkuat hubungan ekonomi dan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral (Sembiring 2022).

Tidak hanya dalam hal diversifikasi mata uang, hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia juga mengalami fluktuasi yang cenderung mengarah pada kondisi yang lebih baik. Hal ini tercermin dari pernyataan Menteri Perdagangan RI, Agus Suparmanto, dalam pertemuan virtual dengan Menteri Perdagangan Australia, Simon Birmingham. Mereka sepakat bahwa "implementasi IA-CEPA sesegera mungkin sangat penting bagi kedua negara karena akan membantu

pemulihan ekonomi pasca-COVID-19 yang menyebabkan kelesuan perekonomian global."

Keyakinan ini didasarkan pada rincian perdagangan kedua negara pada 2019, di mana ekspor Indonesia tercatat senilai USD 2,3 miliar, sementara impor Indonesia dari Australia mencapai USD 558 juta. Selain itu, pada tahun yang sama, nilai investasi Australia di Indonesia mencapai USD 264 juta dengan total 740 proyek. Kerja sama ini menjadi semakin penting untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara (Kemendag 2020).

Cost : hubungan dagang keduanya belum signifikan

Melalui IA-CEPA, yang merupakan wadah bagi Indonesia dan Australia untuk memperdalam kerja sama di bidang ekonomi, tidak dapat dipungkiri bahwa ini membuka peluang pasar yang lebih besar. Santo Darmosumarto, Direktur Asia Timur dan Pasifik Kementerian Luar Negeri RI, menjelaskan bahwa perdagangan Indonesia dan Australia pada kurun 2018-2019 mencatatkan total perdagangan barang antara kedua negara mencapai 17,8 miliar dolar. Diharapkan, dengan adanya IA-CEPA, hubungan perdagangan ini akan terus berkembang mengingat Indonesia merupakan mitra dagang strategis ke-13 bagi Australia.

Namun, dalam tinjauan lebih luas mengenai perdagangan Indonesia dengan Australia pada sektor impor maupun ekspor dari 2013 hingga 2020, Australia hanya mengakomodasi sekitar 3,2% dari total pangsa impor Indonesia, dengan nominal mencapai USD 5 miliar. Secara posisi, angka ini jauh di bawah negara-negara mitra dagang besar lainnya, seperti China, Jepang, dan Singapura (lihat Gambar 6). Hal

ini menunjukkan adanya potensi untuk memperbaiki dan meningkatkan hubungan perdagangan dengan Australia, khususnya dalam sektor impor dan ekspor.

Constraint : komunikasi LCS belum maksimal

Hingga saat ini, Australia belum menunjukkan sikap untuk mengimplementasikan *Local Currency Settlement* (LCS) dengan skema ACCD seperti beberapa mitra dagang lainnya. Bank Sentral Australia (RBA) hanya terus memperbaharui *currency swap*, dengan perpanjangan yang dilakukan pada 18 Februari 2022, yang berlaku selama tiga tahun ke depan.

Terkait LCS Indonesia, yang sejauh ini sedang dipromosikan sebagai cara untuk meningkatkan perdagangan bilateral dengan mata uang lokal, Nadia Maunsell, seorang intern di Australian Institute of International Affairs NSW, dalam tulisannya yang berjudul "*Local Currency Settlement - An 'Asianised Way' in Trade?*" mengungkapkan bahwa banyak negara Asia mulai mengurangi ketergantungan terhadap mata uang USD. Selain itu, ada pula peningkatan penggunaan Renminbi China sebagai mata uang dagang alternatif, yang menjadi bagian dari gerakan lebih luas untuk diversifikasi sistem moneter global.

Dengan Memilih Tiongkok Mendatangkan Keuntungan Ekonomi Jangka Panjang dari kebijakan LCS

Secara rasional, memperkenalkan Tiongkok sebagai mitra *Local Currency Settlement* (LCS) pada tahun 2020 (yang akan diaplikasikan pada September 2021) berimplikasi positif pada sektor ekonomi Indonesia. Pertama, pemerintah Indonesia dapat mempersiapkan infrastruktur ekonomi yang mendukung LCS dengan Tiongkok secara lebih matang, terutama bagi bank yang ditunjuk sebagai lembaga pelaksana LCS dengan Tiongkok. Kedua, kesiapan serta pemahaman yang lebih

baik dari importir dan eksportir Indonesia akan mempermudah penggunaan LCS secara efektif. Selain itu, Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia dapat mempercepat pengurangan ketergantungan terhadap USD.

Dengan Tiongkok sebagai mitra LCS, selain mendorong penggunaan mata uang lokal, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan sektor teknologi LCS. Hal ini menjadikan Tiongkok memiliki nilai lebih dibandingkan mitra lainnya, mengingat Tiongkok telah melangkah lebih jauh dalam teknologi digital. Dalam sesi keuangan digital yang dilansir oleh Ditjen Pemberdayaan Kemenkeu, E-CNY (yuan digital) yang dimiliki Tiongkok dipilih sebagai contoh atau outline dalam pembahasan terkait perkembangan *Central Bank Digital Currency* (CBDC) di Indonesia, serta proses digitalisasi Rupiah. E-CNY telah lebih dahulu diuji coba untuk publik pada April 2021, memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mempelajari dan mengadopsi inovasi serupa dalam sistem moneter digitalnya (DJPb 2022).

Kedepannya, Tiongkok sebagai mitra LCS tidak hanya dapat meningkatkan minat perdagangan dengan menggunakan mata uang lokal, tetapi juga dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam mengembangkan skema transaksi secara digital. Tiongkok telah mengembangkan skema pilot *e-CNY* (yuan digital) sejak 2014, yang pada akhirnya digunakan secara komersial di Beijing Winter Olympics 2022. Melalui Bank Sentral Tiongkok (PBOC), tercatat bahwa terjadi transaksi sekitar RMB 2.000 atau setara dengan USD 315.000 setiap harinya. Proses transaksi ini juga terhitung efisien, di mana *e-CNY* dapat diakses melalui kartu fisik dan smartphone, memberikan kemudahan dalam pelaksanaan transaksi digital (Jones and Jones, 2022).

Dengan kemajuan ini, Indonesia dapat memperoleh manfaat yang signifikan jika mengajak Tiongkok sebagai mitra LCS. Tiongkok tidak hanya menawarkan potensi besar dalam mengurangi ketergantungan terhadap USD, tetapi juga memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk belajar dari perkembangan teknologi transaksi digital yang sudah terbukti efisien dan efektif. Keuntungan ini menjadikan kemitraan dengan Tiongkok jauh lebih efektif dan signifikan dalam mengembangkan dan memperluas implementasi LCS di Indonesia, dibandingkan jika Indonesia tidak memilih Tiongkok sebagai mitra terbaru dalam skema ini.

3.4. Choices Indonesia Membangun Daya Tawar serta Memperkuat Kebijakan LCS sebagai *Instrumen* Ekonomi dengan Tiongkok

Pengembangan instrumen perdagangan menggunakan mata uang lokal (*Local Currency Settlement* atau LCS) sebenarnya telah dilakukan Indonesia sejak 2016 hingga 2018 dengan negara-negara mitra seperti Malaysia dan Thailand. Namun, setelah tiga tahun pengembangan skema ini, muncul kritik yang mengarah pada ketidakproduktifan LCS. Menurut Direktur Riset CORE Indonesia, Piter R. Abdullah, pada tahun 2019, fasilitas LCS untuk keperluan perdagangan internasional masih relatif kecil. Penggunaannya masih terbatas pada beberapa mitra, yaitu Thailand, Malaysia, dan Filipina. Selain itu, minat eksportir Indonesia dan negara-negara ASEAN masih bergantung pada sektor impor yang menggunakan dolar dalam transaksi, yang mengindikasikan bahwa LCS belum sepenuhnya mengurangi ketergantungan terhadap USD dalam perdagangan internasional. Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun ada potensi dalam penggunaan mata uang lokal untuk perdagangan, implementasi LCS masih

menghadapi tantangan, baik dari sisi infrastruktur, kesiapan pasar, maupun ketergantungan yang masih besar pada dolar AS (Alaydrus 2019).

Pada periode 2019-2020, Jepang menjadi mitra LCS yang membawa kebijakan ini menuju kondisi yang lebih ideal, yang tercermin dari peningkatan transaksi LCS yang signifikan—sepuluh kali lipat dibandingkan sebelumnya. Bank Indonesia (BI) mencatat bahwa penggunaan mata uang lokal dalam transaksi antara pelaku usaha di Indonesia dan Jepang mengalami kenaikan yang signifikan. Transaksi yang menggunakan mata uang lokal ini tercatat mencapai USD 109,4 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun per bulan (dengan kurs Rp 14.282 per dolar). Jika dibandingkan dengan periode awal LCS yang pertama kali diterapkan pada 2018 dengan Thailand dan Malaysia, transaksi rata-rata per bulan hanya mencapai USD 31,7 juta, dan total transaksi tahunan hanya sekitar USD 350 juta.

Pada tahun 2020, volume perdagangan LCS antara Indonesia dan Jepang berhasil menyentuh angka USD 797 juta, yang menunjukkan perkembangan positif dan signifikan dalam penggunaan mata uang lokal sebagai alternatif dari dolar AS. Hal ini menandakan keberhasilan implementasi LCS dengan Jepang yang memberikan dampak besar terhadap perdagangan bilateral Indonesia dan dapat menjadi model yang lebih luas untuk negara mitra lainnya (Firman Hidiranto 2022).

Hadirnya Tiongkok mendorong penggunaan LCS

Dengan diperkenalkannya Tiongkok sebagai mitra terbaru dalam skema LCS, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah mitra yang mengaplikasikan sistem ini. Sejak dimulai pada 2018, tercatat ada 141 pelaku usaha yang terlibat dalam LCS, namun pada 2020 jumlahnya melonjak menjadi 1.249 pelaku usaha. Bahkan hingga akhir tahun 2022, jumlah pelaku usaha yang menggunakan LCS

mencapai 2.047 mitra. Peningkatan jumlah mitra ini berpengaruh besar terhadap volume penggunaan LCS yang tercatat pada 2022 mencapai USD 4,1 triliun.

Penambahan jumlah mitra, terutama dengan bergabungnya Tiongkok, memberi dampak signifikan terhadap penguatan dan perluasan skema LCS. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa LCS semakin diterima sebagai alternatif yang efektif dalam perdagangan internasional, yang tidak hanya mengurangi ketergantungan pada dolar AS, tetapi juga meningkatkan daya saing dan efisiensi perdagangan bilateral antara Indonesia dan mitra-mitranya, termasuk Tiongkok (antaranews.com 2023).

Melalui presidensi Indonesia untuk G20 pada 2022, Bank Indonesia (BI) memperkenalkan dan melanjutkan komitmennya untuk mengembangkan metode pembayaran melalui QRIS yang terintegrasi dengan *Local Currency Settlement* (LCS). Pembayaran lintas batas ini dipromosikan sebagai alat untuk memulihkan kegiatan ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Deputy Gubernur BI, Doni P. Joewono, menjelaskan bahwa strategi pembayaran lintas batas ini terus dikembangkan sepanjang tahun 2022. Pada triwulan II, BI bersama bank sentral Thailand memasuki fase komersial, dan pada triwulan III, bank sentral Malaysia juga bergabung. Interkoneksi antara ketiga bank sentral ini memperkuat efisiensi dalam transaksi, dengan metode pembayaran QRIS yang kini dapat digunakan secara *cross-border*. Hal ini diharapkan dapat mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi lintas negara, serta meningkatkan efisiensi dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS (Bank Indonesia 2022, 27–28).

Integrasi QRIS *cross-border* dengan skema LCS tentunya akan mendukung pengurangan penggunaan dolar dalam transaksi internasional. Dengan transaksi

yang dilakukan dalam mata uang lokal, baik untuk sektor perdagangan maupun pariwisata, Indonesia dapat memperkuat kebijakan diversifikasi mata uang dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Selain itu, ini juga menciptakan peluang bagi ekonomi lokal untuk tumbuh lebih pesat, dengan dampak positif bagi para pelaku UMKM yang lebih mudah mengakses pasar global tanpa harus bergantung pada mata uang asing (Bank Indonesia 2022, 28).

Peningkatan transaksi LCS yang signifikan, dari rata-rata 211,2 juta dolar AS per bulan pada 2021 menjadi 341,9 juta dolar AS pada 2022, menunjukkan bahwa integrasi QRIS *cross-border* Indonesia-Malaysia-Thailand telah memberikan dampak positif yang nyata. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transaksi lintas negara, tetapi juga mempercepat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan antarnegara, seiring dengan bertumbuhnya minat pelaku ekonomi untuk memanfaatkan sistem pembayaran yang lebih murah dan cepat.

Peningkatan volume transaksi ini juga menjadi indikator keberhasilan dari kebijakan Bank Indonesia dalam mendorong diversifikasi mata uang melalui *Local Currency Settlement* (LCS) dan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Dengan sistem pembayaran QRIS yang semakin terintegrasi di kawasan ini, Indonesia, Malaysia, dan Thailand dapat memperkuat hubungan ekonomi mereka dengan cara yang lebih efisien dan berkelanjutan, sambil mendukung pertumbuhan ekonomi lokal (Bank Indonesia 2022, 57.).

Dengan demikian, pengembangan *Local Currency Settlement* (LCS) yang memakan waktu hingga lima tahun ini berfungsi untuk membangun daya tawar Indonesia, memperkuat kesiapan infrastruktur ekonomi, dan mempromosikan pengaplikasian mata uang lokal sebagai opsi dalam perdagangan bilateral. Pada

tahun yang sama, Tiongkok menjadi mitra terbaru dalam skema LCS Indonesia, yang diresmikan pada September 2021. Kehadiran Tiongkok sebagai mitra LCS Indonesia memberikan dampak positif, terbukti dengan angka peningkatan yang signifikan, mencapai USD 1,68 miliar atau sekitar Rp 24 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan LCS Indonesia.

Berkaca pada alasan-alasan rasional ini, Tiongkok menjadi mitra yang sangat strategis bagi Indonesia dalam pengembangan dan penggunaan mata uang lokal. Pencapaian yang telah dijelaskan menunjukkan bahwa, dalam kurun waktu lima tahun sejak 2018 hingga 2022, pengembangan LCS Indonesia semakin progresif. Kritikan terkait produktivitas LCS semakin teratasi, dan LCS dipromosikan sebagai bagian dari diversifikasi mata uang dalam agenda Indonesia sebagai presidensi G20 tahun 2022. Di sana, LCS atau penggunaan mata uang lokal diposisikan sebagai salah satu instrumen untuk pemulihan ekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi global.

Bab 4

Penutup

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis kerja sama bilateral Indonesia-Tiongkok dalam Local Currency Settlement (LCS) menggunakan teori *Rational Choice* oleh Graham T. Allison. Fokusnya adalah kebijakan ekonomi Indonesia dalam mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral sebagai respons terhadap fluktuasi USD yang melemahkan rupiah.

Skema LCS mulai dikembangkan sejak 2016 dengan Thailand dan Malaysia, kemudian diperluas ke Jepang pada 2019, dengan total transaksi mencapai USD 800 juta. Pada 2020, Indonesia mengumumkan Tiongkok sebagai mitra baru, yang mulai diterapkan pada akhir 2021. Penambahan mitra ini menunjukkan konsistensi Indonesia dalam memperluas perdagangan berbasis mata uang lokal. Oleh karena itu, teori *Rational Choice* digunakan untuk menilai rasionalitas pemerintah dalam memilih Tiongkok sebagai mitra LCS.

Kebijakan LCS bertujuan mengurangi risiko ketidakpastian pasar global yang menyebabkan penguatan USD dan depresiasi rupiah. Ketergantungan tinggi pada USD dalam ekspor (95%) dan impor (85%) membuat pasar valas Indonesia rentan terhadap guncangan global, yang dapat mengancam stabilitas keuangan dan ekonomi. Oleh karena itu, diversifikasi mata uang melalui LCS dianggap efektif

untuk meredam fluktuasi rupiah, terutama dengan meningkatnya perdagangan Indonesia di Asia, khususnya dengan Jepang dan Tiongkok.

Perdagangan Indonesia-Tiongkok mencapai USD 60 miliar per tahun, sementara dengan Jepang mencapai USD 30 miliar, menunjukkan potensi besar dalam penggunaan mata uang lokal. Minat terhadap LCS semakin berkembang, terlihat dari komunikasi BI dengan bank sentral negara lain melalui BCSA. Jepang, Korea Selatan, Australia, Tiongkok, dan Singapura telah menunjukkan ketertarikan terhadap transaksi dengan mata uang lokal. Sejak 2018, PBoC menjadi mitra utama Indonesia dengan BCSA senilai CNY 100 miliar, yang meningkat dua kali lipat menjadi CNY 200 miliar (Rp 400 triliun) pada 2020. Dengan demikian, memperluas dan memperkuat penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan bilateral menjadi tujuan utama kebijakan LCS.

Memilih Tiongkok sebagai mitra LCS memiliki dampak ekonomi dan politik bagi Indonesia. Sebagai mitra dagang terbesar sejak 2013, dominasi Tiongkok dalam perdagangan dan kebijakan devaluasi Yuan akibat perang dagang dengan AS menimbulkan tantangan bagi pasar domestik. Namun, pemerintah tetap menjalin kerja sama ini karena pertumbuhan positif dalam volume transaksi dan partisipasi pelaku usaha.

Sejak Tiongkok bergabung sebagai mitra LCS pada 6 September 2021, transaksi meningkat dari USD 348 juta pada 2018 menjadi USD 4,1 miliar pada 2022, sementara jumlah pelaku usaha yang menggunakan LCS naik dari 141 menjadi 1.249 di periode yang sama. Selain itu, UU No. 2 tentang pemulihan ekonomi nasional mengintegrasikan LCS dengan QRIS lintas batas, meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Pada Juni 2022, transaksi QRIS melalui BSI Mobile

mencapai Rp 524 miliar dari 270 ribu transaksi, mendukung sektor pariwisata Indonesia dan Thailand. Integrasi ini diharapkan semakin memperkuat penggunaan LCS sesuai dengan Blueprint Pengembangan Pasar Uang (BPPU) 2025, yang menargetkan digitalisasi sistem pembayaran.

4.2. Rekomendasi

Penelitian ini memang menyajikan pemahaman yang mendalam mengenai kebijakan Local Currency Settlement (LCS) dengan Tiongkok, namun tentu saja masih terdapat beberapa celah yang dapat dikembangkan dalam penelitian lebih lanjut. Beberapa area yang bisa menjadi fokus pengembangan penelitian di masa mendatang antara lain:

1. Dampak dari Relevansi Tiongkok sebagai mitra dagang terbesar Indonesia berdampak besar pada peningkatan LCS Indonesia namun disisi lain besarnya dampak perdagangan Tiongkok tersebut, juga dapat menyebabkan dominasi pasar domestik Indonesia
2. Pengaruh kebijakan pemerintah Indonesia dalam melaksanakan diversifikasi mata uang, yang bertujuan mengurangi eksposur USD terhadap hubungan Indonesia dan AS
3. Dampak integrasi *Local currency settlement* yang dengan QRIS secara lintas batas, terhadap perdagangan Indonesia

4.3. Saran

Melihat bahwasanya topik terkait penguatan mata uang lokal sebagai *Instrument* di dalam kerja sama bilateral akan menunjukkan minat yang potensial untuk dikembangkan untuk itu penulis mengharapkan referensi-referensi baru

kedepannya terkait cara Indonesia mengembangkan serta ‘merawat’ mitra dalam kerja sama LCS, terlebih beberapa kritik yang mengarah tidak produktifnya LCS dengan terbatasnya mitra yang sekarang.

Tidak dipungkiri bahwasanya penambahan mitra dapat menjadi manuver yang baik terkhusus negara yang menunjukkan minat pada penguatan mata uangnya seperti Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan yang sebelumnya telah menjalin BCSA dengan Indonesia. Mengetahui bahwasanya pengembangan dari penggunaan mata uang lokal tidak berhenti pada agenda LCS saja namun juga menjadi awal dari inovasi kebijakan *Cross Border Payment*, dan *Central Bank Digital Currency*.

Sehingga kedepannya skema *Local Currency Settlement* akan mengalami banyak tantangan yang tidak dapat penulis cantumkan di dalam penelitian ini, dan untuk itu penulis menyarankan beberapa aspek seperti negara mitra mana saja yang akan Indonesia ikut sertakan pada kerja sama ini, hingga sejauh mana kesiapan Indonesia dalam mengembangkan skema pembayaran lintas batas dan proses digitalisasi mata uangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisti, Maria. "PERAN BALI DEMOCRACY FORUM (BDF) DALAM MENGHADAPI BERBAGAI TANTANGAN DEMOKRASI DI ASIA PASIFIK (2008-2014)." *Sovereign, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 2014: 459.
- Gulyás,, László. "The China – Indochina Peninsula Economic Corridor." *European Union*, 2020: 4-12.
- R, Sherly Wilya. "PENGARUH PRODUK DOMESTIK BRUTO, INFLASI DAN CAPITAL ACCOUNT TERHADAP NILAI TUKAR RUPIAH ATAS DOLLAR AMERIKA SERIKAT PERIODE TAHUN 2001-2014 ." *Jom FEKON Vol. 2*, 2015: 2.
- Rhee, Changyong, and Lea Sumulong. "Regional Settlement Infrastructure and Currency Internationalization: The Case of Asia and the Renminbi." *ADB Working Paper Series*, 2014: 26-28.
- Suroyo, Gayatri, and Fransiska Nangoy. *REUTERS*. 16 February 2022. https://docs.google.com/document/d/1n_vU9Ge-tAB1rmAyl77ERNODp9X86spgeMc8VzYBgLM/edit (accessed september 18, 2023).
- Tan, Weizhen. *CNBC markets*. 02 september 2018. <https://www.cnn.com/2018/09/03/indonesia-rupiah-falls-to-weakest-level-in-more-than-20-years.html> (accessed february 13, 2024).
- Departemen Komunikasi. *Bank Indonesia* . 08 july 2022. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/Transaksi-Antarnegara-Tak-Lagi-Bergantung-pada-Satu-Mata-Uang.aspx>.
- Alaydrus, Hadijah. *Finansial*. 25 March 2019. <https://finansial.bisnis.com/read/20190325/11/904067/kurangi-ketergantungan-dolar-as-bank-indonesia-dorong-perluasan-transaksi-lcs-dengan-malaysia-dan-thailand> (accessed january 02, 2024).
- Alice D. BA. *britannica.com*. 15 december 2023. <https://www.britannica.com/money/topic/Asian-financial-crisis> (accessed 01 28, 2024).

- Allison, graham T. "Essence of decision : explaining the Cuban missile crisis." In *Essence of decision : explaining the Cuban missile crisis*, by Graham T Allison, 29. Boston : Little, Brown and Company, [1971] ©1971, 1971.
- Asia Regional Integration Center. *ASEAN+3 Asian Bond Markets Initiative (ABMI)*. n.d. <https://aric.adb.org/initiative/asean3-asian-bond-markets-initiative> (accessed december 25, 2022).
- ASIA REGIONAL INTEGRATION CENTER. *ASIA REGIONAL INTEGRATION CENTER*. 2015. <https://aric.adb.org/initiative/asean3-asian-bond-markets-initiative>.
- Bank Indonesia . *REVIEW Penerapan Inflation Targeting Framework di Indonesia*. Review, JAKARTA: Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter , 2009.
- Bank Indonesia. *bi.go.id*. 6 september 2021. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2322721.aspx.
- Bank Indonesia. "Laporan Keuangan Tahunan Bank Indonesia." 2018, 6.
- Bank Indonesia. *Laporan Perekonomian Indonesia*. Bank Indonesia, 2018, 32.
- Bank Indonesia. "Laporan Tahunan Bank Indonesia." 2019.
- CNBC, Indonesia. *cnbcindonesia.com*. 06 april 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230406160640-4-427952/catat-sejak-2018-ri-dengan-negara-ini-sepakat-buang-dolar>.
- CNN Indonesia. *Kepala BKPM Buka Dampak Buruk Ekonomi RI Bergantung ke China*. Senin, 13 Juli 2020. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200713131044-92-524009/kepala-bkpm-buka-dampak-buruk-ekonomi-ri-bergantung-ke-china> (accessed november 12, 2023).
- Databooks. *databooks*. 06 september 2018. databoks.katadata.co.id.
- Goldstein, avery . "China's Grand Strategy under Xi Jinping." *International Security Vol. 45, No. 1*, 2020: 164-201.
- Hamilton-Hart, Dr Natasha , and Dr Dave McRae . "INDONESIA: BALANCING THE UNITED STATES AND CHINA, AIMING FOR INDEPENDENCE." *United States Studies Centre* (United States Studies Centre), 2015: 12-16.
- Herman. *Jakart Globe*. 16 march 2020. <https://jakartaglobe.id/business/indonesia-posts-largest-trade-surplus-since-2011-as-coronavirus-disrupts-imports-from-china> (accessed february 13, 2024).
- Hokianto, Hugo Fostin. "LOCAL CURRENCY SETTLEMENT DI INDONESIA: LATAR BELAKANG, PERKEMBANGAN, DAN DAMPAK." *Arthavidya Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 2023: 199.
- Indonesia, Bank. *Bank Indonesia*. 5 august 2021. https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2319121.aspx (accessed januari 02, 2024).
- INDONESIA, GUBERNUR BANK. *PENYELESAIAN TRANSAKSI BILATERAL ANTARA INDONESIA DAN TIONGKOK MENGGUNAKAN RUPIAH DAN YUAN MELALUI BANK*. PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR, Jakarta: Bank Indonesia, 2021.
- INDONESIA.GO.ID. *INDONESIA.GO.ID*. 6 june 2022. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4992/penggunaan-mata-uang->

- lokal-mempercepat-pemulihan-ekonomi-nasional?lang=1 (accessed march 3, 2024).
- kemenkeu RI. *Kementrian keuangan republik Indonesia*. 31 may 2021.
<https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/pengaruhcovid> (accessed february 17, 2024).
- Maria Elena. *Bisnis.com*. 16 February 2022.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220216/9/1501189/bos-bi-implementasi-lcs-mampu-kurangi-dampak-sistemik-dan-guncangan-global> (accessed March 7, 2024).
- Peterson, Daniel . “China’s Power Play in Indonesia: Infrastructure Investment and Territorial Incursions.” *Moussons [Enligne]*, 2023: 223-247.
- Pratama, Wibi pangestu. *Bisnis.com*. 16 february 2022.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20220216/9/1501009/sri-mulyani-program-local-currency-settlement-bisa-jadi-exit-strategy-dari-tekanan-covid-19> (accessed february 17, 2024).
- Putra, Tri. *CNBC*. 12 september 2020.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200912111947-17-186291/kisah-rupiah-terkapar-lawan-dolar-as-gara-gara-psbb-total> (accessed february 13, 2024).
- Rahman, M. Sigit Andhi . “Multilateralism in East Asia: Analysis of Chiang Mai Initiative (CMI) within ASEAN+3 Framework.” *Jurnal Kajian Wilayah, Vol. 1, No. 1*, 2010: 101-118.
- Safyra Primadhyta | *CNN Indonesia*. *CNN Indonesia*. 16 february 2022.
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220216142425-532-759962/sri-mulyani-dorong-penggunaan-mata-uang-lokal-dalam-ekspor-impor> (accessed march 7, 2024).
- Steil, Benn , Benjamin Della Rocca, and Dinah Walker. *Council of foreign relations*. 9 february 2024. <https://www.cfr.org/central-bank-currency-swapssince-financial-crisis/#!/#intro>.
- Sugema, Iman . “Krisis Keuangan Global 2008-2009 dan Implikasinya pada Perekonomian Indonesia.” *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI)*, 2012: 151.
- Sukirno, Sadono. *Pengantar makro ekonomi*. Vol. edisi ketiga . Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Tarmidi, Lepi T. “KRISIS MONETER INDONESIA : SEBAB, DAMPAK, PERAN IMF DAN SARAN.” *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 1999: 10-11.
- Triyono. “ANALISIS PERUBAHAN KURS RUPIAH TERHADAP DOLLAR AMERIKA.” *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.9*, december 2008: 156-167.
- Ulya, Fika Nurul , and Sakina Rakhma Diah Setiawan . *Kompas.com*. 25 july 2019. <https://money.kompas.com/read/2019/07/25/143300726/10-persen-perdagangan-indonesia-telah-gunakan-mata-uang-yuan-china> (accessed february 13, 2024).
- weasley, michael. *The Asian Crisis and the Adequacy of Regional Institutions*. JOURNAL ARTICLE, Contemporary Southeast Asia, 1999.
- Wijayanto, Adishta Librata . “Perkembangan Pasar Surat Utang Indonesia dan Peran Asian Bond Market Initiative.” *Kajian Singkat*, 2022: 18.

- Wildan, Muhammad. *Bisnis.com*. 29 January 2020.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200129/9/1194965/realisasi-investasi-jepang-kalah-dari-china-ini-penyebabnya> (accessed January 04, 2024).
- Yerichielli. "INDONESIA – AMERIKA DALAM KERANGKA COMPREHENSIVE PARTNERSHIP." *Global Political Studies Journal*, 2019 : 106.
- Zou, Zhiqiang . "The Economic Stall in Turkey: Causes and Impacts." *Developing Country Studies Vol.7, No.10*, 2017: 31-36.
- Alaydrus, Hadijah. 2019. "Dampak Implementasi LCS Tidak Signifikan, Tapi Perlu." *Bisnis.com*. April 5, 2019.
<https://finansial.bisnis.com/read/20190405/11/908500/dampak-implementasi-lcs-tidak-signifikan-tapi-perlu>.
- antaranews.com. 2023. "BI: Nilai LCT Indonesia mencapai 4,1 miliar dolar AS pada 2022." *Antara News*. June 5, 2023.
<https://www.antaranews.com/berita/3572076/bi-nilai-lct-indonesia-mencapai-41-miliar-dolar-as-pada-2022>.
- Aprilia Dwi Rasdiyanti and Suyeno. 2022. "Analisis SWOT Kebijakan Local Currency Settlement Indonesia-China." *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, May, 13–24.
<https://doi.org/10.30649/aamama.v25i1.131>.
- Bank Indonesia. 2022. "Edisi-93_Presidensi-G20_Indonesia-Ajak-Dunia-Pulih-Bersama."
- BBC. 2020. "US Reverses China 'currency Manipulator' Label," January 13, 2020. <https://www.bbc.com/news/business-51098294>.
- "Bib-Public-66.Pdf." n.d. Accessed January 30, 2025.
<https://berkas.dpr.go.id/pa3kn/analisis-tematik-apbn/public-file/bib-public-66.pdf>.
- "Blueprint-Pengembangan-Pasar-Uang-2025.Pdf." n.d. Accessed November 25, 2024. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/kajian/Documents/Blueprint-Pengembangan-Pasar-Uang-2025.pdf>.
- "CORE Indonesia." n.d. Accessed January 30, 2025.
https://bkperdag.kemendag.go.id/media_content/2021/08/gambirtradetalk1tahun2021-20210818174700xmdjbe7to4.pdf.
- DJPb, S. A. 2022. "Mengenal Lebih Dekat Central Bank Digital Currency (CBDC)." February 14, 2022.
<https://djpb.kemenkeu.go.id/direktorat/pkn/id/odading/2918-mengenal-lebih-dekat-central-bank-digital-currency-cbdc.html>.
- Firman Hidranto. 2022. "Indonesia.go.id - Penggunaan Mata Uang Lokal, Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional." June 6, 2022.
<https://indonesia.go.id/kategori/editorial/4992/penggunaan-mata-uang-lokal-mempercepat-pemulihan-ekonomi-nasional?lang=1>.
- GIANIE. 2020. "Geliat Kurs Rupiah di Masa Pandemi." *kompas.id*. September 3, 2020. <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/09/03/geliat-kurs-rupiah-di-masa-pandemi/>.
- Kemendag. 2020. "Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Antara Indonesia dan Australia akan Berlaku Efektif 5 Juli 2020 - Kementerian Perdagangan Republik Indonesia." Mei 2020.

- <https://www.kemendag.go.id/berita/siaran-pers/perjanjian-kemitraan-ekonomi-komprehensif-antara-indonesia-dan-australia-akan-berlaku-efektif-5-juli-2020>.
- Kementrian Koordinator bidang perekonomian Indonesia. 2020. "Indonesia Perkuat Kerja Sama Bilateral dengan Korsel dalam Penanganan Pandemi Covid-19 - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia." April 6, 2020.
<https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/214/indonesia-perkuat-kerja-sama-bilateral-dengan-korsel-dalam-penanganan-pandemi-covid-19>.
- "Laporan Perekonomian Indonesia 2016." n.d. Accessed December 12, 2024.
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI2016-web.pdf>.
- Laucereno, Sylke Febrina. 2019. "215 Miliar Yuan China Masuk ke Indonesia Tahun Lalu." *detikfinance*. September 26, 2019.
<https://finance.detik.com/moneter/d-4229619/215-miliar-yuan-china-masuk-ke-indonesia-tahun-lalu>.
- "LPI_2022.Pdf." n.d. Accessed December 4, 2024.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/LPI_2022.pdf.
- Media, Kompas Cyber. 2021. "Ini Alasan Jokowi Dulu Pilih China dan Tolak Jepang Garap Kereta Cepat Halaman all." *KOMPAS.com*. October 29, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/10/30/063344926/ini-alasan-jokowi-dulu-pilih-china-dan-tolak-jepang-garap-kereta-cepat>.
- Musyaffa, Iqbal. 2018. "Catatan Penting Dari KTT ASEAN Ke 33." November 18, 2018. <https://www.aa.com.tr/id/ekonomi/catatan-penting-dari-ktt-asean-ke-33/1313821>.
- Pangastuti, Triyan. 2020. "BI Janji Kurangi Ketergantungan Rupiah pada Dolar AS." *investor.id*. Des 2020. <https://investor.id/business/230089/bi-janji-kurangi-ketergantungan-rupiah-pada-dolar-as>.
- Pattiradjawane, René L. 2016. "The Indonesian Perspective toward Rising China: Balancing the National Interest." *Asian Journal of Comparative Politics* 1 (3): 260–82. <https://doi.org/10.1177/2057891116646226>.
- "PBI_221220.Pdf." n.d. Accessed February 7, 2025.
https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Documents/PBI_221220.pdf.
- Pransuamitra, Putu Agus. 2020a. "Selain China, RI Kolaborasi Dengan 5 Negara 'Buang' Dolar AS." *CNBC Indonesia*. October 4, 2020.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20201004123718-17-191746/selain-china-ri-kolaborasi-dengan-5-negara-buang-dolar-as>.
- . 2020b. "Selain China, RI Kolaborasi Dengan 5 Negara 'Buang' Dolar AS - Halaman 2." *CNBC Indonesia*. October 4, 2020.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20201004123718-17-191746/selain-china-ri-kolaborasi-dengan-5-negara-buang-dolar-as>.
- Rakhmat, Muhammad Zulfikar. 2020. "Dampak penting kesepakatan Indonesia dan Cina untuk mempromosikan penggunaan Yuan dan Rupiah." *The Conversation*. October 15, 2020. <http://theconversation.com/dampak-penting-kesepakatan-indonesia-dan-cina-untuk-mempromosikan-penggunaan-yuan-dan-rupiah-148086>.
- Santika, Erlina F. 2023. "Melihat Fluktuasi Nilai Tukar Dolar AS terhadap Rupiah 2017-2023 | Databoks." *Databooks*. 2023.

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/06/21/melihat-fluktuasi-nilai-tukar-dolar-as-terhadap-rupiah-2017-2023>.
- Sembiring, Lidya Julita. 2022. "Bye Dolar AS! RI & Australia Transaksi Pakai Mata Uang Lokal." CNBC Indonesia. February 21, 2022.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20220221092117-17-316879/bye-dolar-as-ri-australia-transaksi-pakai-mata-uang-lokal>.
- Setiaji, Hidayat. 2019. "Konkret, Ini Cara RI Kurangi Ketergantungan terhadap Dolar AS." CNBC Indonesia. November 5, 2019.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20191105134936-17-112790/konkret-ini-cara-ri-kurangi-ketergantungan-terhadap-dolar-as>.
- Sussangkarn, Chalongphob. 2019. "Local Currency Contribution to the CMIM," January.
- Tziamalis, Alexander, and Yuan Wang. 2022. "Lima dampak serius penguatan dolar AS terhadap perekonomian dunia." The Conversation. July 13, 2022.
<http://theconversation.com/lima-dampak-serius-penguatan-dolar-as-terhadap-perekonomian-dunia-186881>.
- Wahyudi, Nyoman Ary. 2021. "Pacu Perdagangan dengan China, Pemerintah Apresiasi Implementasi LCS." Bisnis.com. November 24, 2021.
<https://finansial.bisnis.com/read/20211124/90/1469926/pacu-perdagangan-dengan-china-pemerintah-apresiasi-implementasi-lcs>.
- Waranggani, Iloni Azarine, and Shanti Darmastuti. 2024. "Kerja Sama Keuangan Antara Indonesia Dan Jepang Melalui Local Currency Settlement Di Sektor Perdagangan Pada Periode 2020-2023." *Jurnal MADANI: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora* 7 (1): 33–47.
<https://doi.org/10.33753/madani.v7i1.347>.
- Webinar Bank Mandiri, dir. 2021. *Local Currency Settlement Framework Indonesia - Tiongkok*. <https://www.youtube.com/watch?v=dICliazp5x0>.
- Widi, Hendriyo. 2021. "Transaksi Ekspor-Impor RI-China Bisa Pakai Rupiah dan Yuan." *kompas.id*. August 5, 2021.
<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/08/05/transaksi-ekspor-impor-ri-china-bisa-pakai-rupiah-dan-yuan>.
- Wildan, Muhamad. 2020. "Realisasi Investasi Jepang Kalah dari China, Ini Penyebabnya." Bisnis.com. January 29, 2020.
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200129/9/1194965/realisasi-investasi-jepang-kalah-dari-china-ini-penyebabnya>.